

DITERIMA DARI ..BAWASLU.....
NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Jumat
TANGGAL : 5 Juli 2019
JAM : 16.20 WIB

DITERIMA DARI ..Bawaslu.....
NOMOR 172.04-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Jumat
TANGGAL : 5 Juli 2019
JAM : 16.20 WIB

DITERIMA DARI ..Bawaslu.....
NOMOR 203.11.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Jumat
TANGGAL : 5 Juli 2019
JAM : 16.20 WIB

DITERIMA DARI ..Bawaslu.....
NOMOR 243.06-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : JUMat
TANGGAL : 5 Juli 2019
JAM : 16.20 WIB

DITERIMA DARI ..Bawaslu.....
NOMOR 250.00-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Jumat
TANGGAL : 5 Juli 2019
JAM : 16.20 WIB

DITERIMA DARI ..Bawaslu.....
NOMOR 42.13-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Jumat
TANGGAL : 5 Juli 2019
JAM : 16.20 WIB

Jayapura , 5 Juli 2019

Nomor : 215/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.06.01/VII/2019
Lampiran : 1 Bundel
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Papua terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR RI, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun
2019

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

Sehubungan dengan adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan ... rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara

tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua **menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD** di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;

1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan

1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua;

(Bukti Pk.34 -1)

1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; **(Bukti Pk.34 -1)**

1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir** model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.

- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
 - 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 - 2)**
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:
- 1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -1)**
 - 1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang

disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; (**Bukti Pk.34.12 -2**)

- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;
- 1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; (**Bukti Pk.34 -3**)
- 1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;
 - 1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan

- 1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.
- 1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
- 1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;
- 1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; (**Bukti Pk.34 -4**)
- 1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara

dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;

- 1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;
 - 1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu

DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.

- 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;
 - 1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;
 - 1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; (**Bukti Pk.34 - 5**)
 - 1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; (**Bukti Pk.34.1 -1**)
- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-**

Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal **10 Mei 2019** yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34 -7)**

- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**
- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada

formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;

- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -9**)
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -9**)
- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyangdingkan data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -10**)
- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara

tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;

- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokkan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokkan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;
- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak

mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; (**Bukti Pk.34 -12**)

- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;
- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta

KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo;
(Bukti Pk.34 -14)

- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan;
(Bukti Pk.34 -15)
- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara

tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;

- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019**

tertanggal 14 Mei 2019, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; **(Bukti Pk.34 -17)**

- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; **(Bukti Pk.34 -18)**
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -19)**
- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; **(Bukti Pk.34 -19)**
- 1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** perihal Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara

tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; (**Bukti Pk.34 -20**)

1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; (**Bukti Pk.34 -21**)

1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; (**Bukti Pk.34 -22**)

1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; (**Bukti Pk.34 -23**)

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan DPD

1.1 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 07-33 atas nama Carel Suebu

1.1.1 Terhadap dalil Pemohon (IV.4.1.1) yang menyebutkan formulir **model DB1 DPD untuk Kabupaten Puncak** tidak diberikan kepada saksi

1	Jumlah Pemilih dalam DPT	75.961	75.961	75.961	75.961
2	Jumlah Pemilih dalam DPTb	50	50	50	50
3	Jumlah Pemilih dalam DPK	4402	4402	4402	4402
4	Jumlah Pemilih (A.1+.A.2+.A.3)	80.413	80.413	80.413	80.413

d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi, pembetulan tersebut di atas tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing peserta Pemilu, karena pembetulan tersebut akibat adanya kekeliruan dalam penulisan jumlah DPT, DPTb, dan DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(PK 34.10-4)**

2.12 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 170.04.33

2.12.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

2.12.1.1 Terhadap dalil Permohonan (4.1.1. Hal 4) yang menyebutkan Termohon telah melakukan pengurangan perolehan suara Pemohon Caleg Nomor Urut 1 atas nama Paskalis Kossay, S.Pd., M.M., di Kabupaten Jayawijaya kehilangan sebanyak 80.000 suara, Kabupaten Mimika kehilangan sebanyak 50.000 dan

Kabupaten Lanny Jaya kehilangan sebanyak 20.000 suara pada tingkat Pleno KPU Kabupaten Jayawijaya. Termohon juga telah melakukan pengurangan dan pengalihan perolehan serta penggelembungan jumlah pemilih dan penggelembungan jumlah suara Pemohon Caleg Nomor Urut 3 atas nama ELION NUMBERI ST,S.H., Permasalahan mendasar tersebut telah terjadi di Kabupaten Tolikara, Kota Jayapura, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Asmat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak. Selain itu Termohon telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara Pemohon Caleg Nomor Urut 10 atas nama YAKOBUS JAGONG, S.TP., yang seharusnya memperoleh kursi ke 2 DPR untuk Dapil Papua. Terkait hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan rapat pleno terbuka pada tanggal 12 Mei 2019 di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya, KPU Kabupaten Jayawijaya menetapkan Rekapitulasi Penghitungan suara Calon Anggota Dewan perwakilan Rakyat RI Model DB1, dimana pemohon atas nama Paskalis Kossay, S.Pd., MM

memperoleh suara sebanyak 21.606 (duapuluh satu ribu enam ratus enam) suara yang dapat dilihat pada table berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPR RI)
1	Paskalis Kossay, S.Pd., MM	21.606
2	Trifina M. Tinal	0
3	Elion Numberi, S.Th	0
4	Syamud Basri Ngabalin, ST	0
5	S Adolf.T.P. Siburian	0
6	Ir. Tutik Kusmining	0
7	Azis Samual	0
8	H.M. Rudi Jundani	0
9	Drs. Hulda Ida Numberi	0
10	Jacobus Jagong, ST	0

(Bukti PK.34-23. 210)

- b. Bahwa berdasarkan dalil pemohon (4.1.4.4 – angka 2) yang menyebutkan bahwa terjadi pengurangan suara Calon Legislatif DPR Partai GOLKAR nomor Urut 1 sebanyak 50.000 suara ditingkat Pleno kabupaten Mimika dan Pleno Rekapitulasi pada tingkat kabupaten, KPU Kabupaten Mimika hanya melakukan Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Pemilu Calon Anggota DPRD tingkat kabupaten,

Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 sampai dengan 10 Mei 2019 terhadap Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara DPRD tingkat kabupaten yang mana dari hasil Rekapitulasi tersebut, KPU Kabupaten Mimika memberikan Salinan Formulir Model DB-1 DPR yang merupakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DA1-dari masing-masing di Kabupaten Mimika kepada Bawaslu Kabupaten Mimika (*Vide Bukti PK-34-24-04*).
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Rekapitulasi hasil Penghitungan dan Perolehan Suara DPR tingkat kabupaten Mimika tanggal 30 April sampai dengan tanggal 09 Mei 2019, sertifikat hasil perolehan suara yang dibuat oleh KPU Kabupaten Mimika berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara pada Formulir model DA1-DPR dari masing-

masing Distrik (*Bukti PK-34-24-05 s.d Bukti PK-34-24-13*).

- Bahwa dari hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara terhadap Pemilihan DPR Tingkat Kabupaten Mimika, berdasarkan dokumen Sertifikat hasil yang diterima dari 18 (Delapan Belas) Panitia Pemilihan Distrik di Kabupaten Mimika, diperoleh rincian sebagai berikut:
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Agimuga yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya		0
A.2	1	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	0
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	0
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	0
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	0
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	0
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	0

	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	0
	8	H.M. RUDY JUNDANI	0
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	0
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		0

(Bukti PK-34-24-04)

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Alama yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No		Uraian	Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4.	Partai Golongan Karya	0
A.2	1	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	0
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	0
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	0
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	0
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	0
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	0

	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	108
	8	H.M. RUDY JUNDANI	0
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	0
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		108

(Bukti PK-34-24-15)

- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Amar yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya		48
A.2	1	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	12
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	403
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	4
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	3
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	1
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	4
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	195
	8	H.M. RUDY JUNDANI	2

	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	1
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		673

(Bukti PK-34-24-16)

- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Hoya dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya		0
A.2	1	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	0
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	340
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	0
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	0
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	0
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	0
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	0
	8	H.M. RUDY JUNDANI	0
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	0
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		340

(Bukti PK-34-24-17)

- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap

pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Iwaka dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya	324
A.2	1 PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	100
	2 TRIFENA M TINAL, B.Sc	232
	3 ELION NUMBERI, S.Th.	154
	4 SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	15
	5 S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	2
	6 Ir. TUTIK KOESMINING	5
	7 AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	11
	8 H.M. RUDY JUNDANI	5
	9 Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	6
	10 YAKOBUS JAGONG, S.T.P	63
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	917

(Bukti PK-34-24-18)

- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Jila dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya	0
A.2	1 PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	0
	2 TRIFENA M TINAL, B.Sc	0
	3 ELION NUMBERI, S.Th.	100
	4 SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	0
	5 S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	0
	6 Ir. TUTIK KOESMINING	0
	7 AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	0
	8 H.M. RUDY JUNDANI	0
	9 Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	0
	10 YAKOBUS JAGONG, S.T.P	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	100

(Bukti PK-34-24-19)

- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Jita dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya	0

A.2	1	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	0
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	0
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	110
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	0
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	0
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	0
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	900
	8	H.M. RUDY JUNDANI	0
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	0
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		1.010

(Bukti PK-34-24-20)

- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Kuala Kencana dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya	408
A.2	1 PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	375
	2 TRIFENA M TINAL, B.Sc	2.013
	3 ELION NUMBERI, S.Th.	81
	4 SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	68
	5 S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	50
	6 Ir. TUTIK KOESMINING	49

	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	652
	8	H.M. RUDY JUNDANI	20
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	24
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	314
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		4.054

(Bukti PK-34-24-21)

- k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Kwamki Narama dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya		8
A.2	1	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	41
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	678
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	0
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	0
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	0
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	0
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	0
	8	H.M. RUDY JUNDANI	0
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	0
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		727

(Bukti PK-34-24-22)

- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Mimika Barat dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya		74
A.2	1	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	25
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	35
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	10
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	10
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	2
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	1
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	101
	8	H.M. RUDY JUNDANI	0
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	4
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	1
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		263

(Bukti PK-34-24-23)

- m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Mimika Barat Jauh dilaksanakan pada

tanggal 30 April 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya	0
A.2	1 PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	0
	2 TRIFENA M TINAL, B.Sc	58
	3 ELION NUMBERI, S.Th.	0
	4 SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	0
	5 S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	0
	6 Ir. TUTIK KOESMINING	0
	7 AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	947
	8 H.M. RUDY JUNDANI	0
	9 Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	0
	1 YAKOBUS JAGONG, S.T.P 0	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	1.005

(Bukti PK-34-24-24)

- n. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Mimika Barat Tengah dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Perolehan Suara
----	--------	-----------------------

		berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya	61
A.2	1 PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	45
	2 TRIFENA M TINAL, B.Sc	124
	3 ELION NUMBERI, S.Th.	5
	4 SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	1
	5 S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	0
	6 Ir. TUTIK KOESMINING	0
	7 AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	0
	8 H.M. RUDY JUNDANI	1
	9 Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	2
	10 YAKOBUS JAGONG, S.T.P	25
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	264

(Bukti PK-34-24-25)

- o. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Mimika Baru dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya	3.041
A.2	1 PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	686

	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	5.489
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	299
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	155
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	116
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	61
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	4.174
	8	H.M. RUDY JUNDANI	60
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	50
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	242
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		14.373

(Vide Bukti PK-34-24-01)

- p. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Mimika Tengah dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya	17
A.2	1 PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	15
	2 TRIFENA M TINAL, B.Sc	454
	3 ELION NUMBERI, S.Th.	2
	4 SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	7
	5 S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	2
	6 Ir. TUTIK KOESMINING	0
	7 AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	0

	8	H.M. RUDY JUNDANI	0
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	1
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		498

(Bukti PK-34-24-26)

- q. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Mimika Timur dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya		117
A.2	1	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	40
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	78
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	34
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	9
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	4
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	4
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	67
	8	H.M. RUDY JUNDANI	4
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	2
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	5
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		364

(Bukti PK-34-24-27)

- r. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Mimika Timur Jauh dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya		20
A.2	1	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	118
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	175
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	2
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	2
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	0
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	0
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	0
	8	H.M. RUDY JUNDANI	0
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	0
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		317

(Bukti PK-34-24-28)

- s. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik

Tembagapura dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya		110
A.2	1	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	147
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	179
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	65
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	15
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	17
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	3
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	21
	8	H.M. RUDY JUNDANI	7
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	11
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	10
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		585

(Bukti PK-34-24-29)

- t. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Wania dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Perolehan Suara
----	--------	-----------------------

		berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya	1.234
A.2	1 PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	958
	2 TRIFENA M TINAL, B.Sc	8.197
	3 ELION NUMBERI, S.Th.	504
	4 SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	177
	5 S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	169
	6 Ir. TUTIK KOESMINING	97
	7 AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	1.375
	8 H.M. RUDY JUNDANI	57
	9 Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	54
	10 YAKOBUS JAGONG, S.T.P	300
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	13.122

(Bukti PK-34-24-30)

- u. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik di 46 Distrik di Kabupaten Tolikara, dijelaskan bahwa pemilu telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dengan menggunakan system noken (ikat/sepakat); (Bukti PK 34.27-1) Form A pengawasan 46 distrik.
- v. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik di 46 Distrik di Kabupaten Tolikara, dijelaskan bahwa Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat distrik telah dilaksanakan oleh masing-masing PPD;

- w. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 pada saat rekapitulasi perolehan suara untuk Kabupaten Tolikara di tingkat Provinsi Papua yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe, seorang calon anggota legislatif dari Partai Demokrat atas nama Benny Kogoya masuk keruangan pleno dengan membawa 3 Kotak suara untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi yang masih dalam keadaan disegel, menurut yang bersangkutan bahwa 3 (tiga) kotak suara tersebut merupakan sample dari sejumlah kotak suara yang ada di distrik-distrik di Kabupaten Tolikara;
- l. Bahwa tindak lanjut terhadap temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencermatan bukti-bukti selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap peraturan terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu yang disampaikan oleh penemu disimpulkan :
1. Tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilu atau tindak pemilu yang dilakukan oleh terlapor dan PPD di 15 Distrik di Kabupaten Tolikara;
 2. Bahwa surat pernyataan 15 kepala distrik di Kabupaten Tolikara tidak benar karena semua tahapan

Pemilihan Umum telah terselenggara;

3. Bahwa oleh karena laporan penemu bukan merupakan pelanggaran, maka proses dihentikan atau tidak ditindaklanjuti.

(Bukti PK 34.)

- x. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik di 46 Distrik di Kabupaten Tolikara, maka hasil perolehan suara di masing-masing distrik untuk partai Golkar calon berdasarkan DA1-DPR adalah sebagai berikut :

No	Distrik	Total Perolehan suara Partai politik dan Calon
1.	KARUBAGA	5.878
2.	LIANOGOMA	0
3.	NUMBA	0
4.	KONDA	0
5.	ANAWI	0
6.	WUGI	0
7.	KUBU	0
8.	WENAM	0
9.	KUARI	0
10	NELAWI	0
11.	BIUK	0

12.	POGANERI	0
13.	NABUNAGE	0
14.	GOYAGE	0
15.	GEYA	0
16.	AIR GARAM	0
17.	WAKUWO	0
18.	AWEKU	0
19.	KANGGIME	0
20.	NUNGGAWI	0
21.	WONIKI	0
22.	BOGONUK	0
23.	GILOBANDU	0
24.	TELENGGEME	0
25.	KEMBU	0
26.	GUNDAGI	0
27.	UMAGI	0
28.	DUNDU	0
29.	WINA	0
30.	PANAGA	0
31.	GIKA	0
32.	TIMORI	0
33.	DOW	0

34.	EGIAM	0
35.	WARI	0
36.	WUNIN	0
37.	BOKONDINI	0
38.	BEWANI	0
39.	KAMBONERI	0
40.	TAGIME	0
41.	TAGINERI	0
42.	YUKO	0
43.	DANIME	0
44.	YUNERI	0
45.	KAI	0
46.	BOKONERI	0
Jumlah suara sah Partai Politik Dan Calon		5.878

Sumber : (Bukti PK 34.27-11) DA1 DPR 46 (empat puluh enam) Distrik.

- y. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1

- DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;
- z. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu- Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi. (*Bukti PK 34.*)
- aa. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu- Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU;

- bb. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak pernah menerima laporan atau surat dari saudara hosea genongga.
- cc. Bahwa terhadap laporan saudara Yohan Hengky Nerek yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 21 mei 2019 telah dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara dengan tindak lanjut sebagai berikut :
- a. Syarat Formil tidak terpenuhi, waktu kejadian maupun waktu diketahui yaitu tanggal 17 april 2019 dan baru dilaporkan pada tanggal 21 mei 2019 sesuai dengan tanda terima Laporan 115/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PRO V.PAV/2019.
 - b. Pelapor menyampaikan laporan dengan melampirkan KTP Kota Jayapura yang berarti bukan warga Kabupaten Tolikara yang berhak melaporkan pelanggaran di Kabupaten Tolikara. **(Bukti PK 34.27-2)**
- dd. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, pada tanggal 20 Mei 2019 mengenai pengawasan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kota Jayapura, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara

untuk Distrik Heram dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 bertempat di Kantor Distrik Heram dan berpindah ke Hotel Aston Jayapura pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019; (*Bukti PK.34.21-6*)

ee. Bahwa dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara yang disampaikan oleh PPD Heram, diketahui bahwa daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 49.316 orang. Surat suara yang diterima adalah berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 38.806 lembar;

ff. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPR berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 72.718 lembar; (*Bukti PK.34.21-37*)

gg. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram

untuk pemilihan Calon Anggota DPD berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 29.810 lembar;

hh. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPRD berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 70.951 lembar;

ii. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 49.254 lembar; (*Bukti PK.34.21-38*)

jj. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, dilaksanakan Rapat Terbuka Pleno Rekapitulasi

Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura, saat PPD Distrik Heram menyampaikan data Model DA1.KPU pada semua tingkatan, langsung para saksi peserta pemilu menyampaikan keberatan, keberatan ini terutama terkait dengan dugaan penggelembungan suara pada pemilihan Calon Anggota DPR Provinsi Papua, sehingga Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan untuk segera dilakukan perbaikan terhadap Model DA1.KPU yang disampaikan oleh PPD Distrik Heram;

kk. Bahwa atas saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Jayapura tersebut, KPU Kota Jayapura menjawab bahwa sudah tidak terdapat waktu untuk memperbaikinya. Hal ini disebabkan oleh karena Rekapitulasi Tingkat Kota Jayapura telah melampui tahapan sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2019 dan KPU Kota Jayapura menyampaikan akan membawa persoalan ini ke Tingkat Provinsi Papua;

ll. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 telah di keluarkan Surat Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPRV/2019 Tentang Pernyataan

Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram, hal tersebut dilakukan karena tidak adanya upaya perbaikan terhadap data Model DA1.KPU Distrik Heram; (*Bukti PK.34.21-7*)

mm. Bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura tetap dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, walaupun Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan saran kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan koordinasi dan meminta petunjuk tertulis kepada KPU Provinsi Papua atau KPU RI terkait pelaksanaan pleno dimaksud, mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi telah melewati batas tahapan rekapitulasi perhitungan suara untuk tingkat Kabupaten/Kota. KPU Kota Jayapura membacakan DA1.KPU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura dan dikonversi menjadi DB1.KPU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura, KPU Kota Jayapura membacakan data DA1.KPU yang tidak dilakukan melalui pleno PPD Heram, bahwa alasan yang

- disampaikan KPU Kota Jayapura, data tersebut adalah didapatkan dari PPD Heram dan dianggap sebagai data yang paling benar; (*Bukti PK.34.21-11*)
- nn. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Jayapura, bahwa Bawaslu Kota Jayapura menyarankan KPU Kota Jayapura untuk tidak membacakan Model DA1.KPU Distrik Heram yang tidak dihasilkan lewat pleno PPD Heram. Bawaslu Kota Jayapura menyarankan KPU Kota Jayapura membacakan data Model DA1.KPU Distrik Heram sebelumnya yang dihasilkan dari pleno di Tingkat Distrik Heram, walaupun Model DA1.KPU Distrik Heram tersebut dianggap memiliki sejumlah masalah dan ditolak oleh saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kota Jayapura, namun hal tersebut telah melalui mekanisme yang benar, yakni telah ditetapkan dalam pleno rekapitulasi tingkat distrik oleh PPD Heram;
- oo. Bahwa KPU Kota Jayapura meminta semua peserta Pemilu untuk menyampaikan kebaratannya dengan mengisi form keberatan DB2.KPU, hal tersebut disampaikan oleh KPU Kota Jayapura dengan alasan mengingat waktu yang sangat sempit dan telah

melewati batas waktu tahapan rekapitulasi, maka KPU kota Jayapura tidak dapat lagi melakukan perbaikan terhadap keberatan saksi peserta pemilu; (*Bukti PK.34.21-47*)

pp. Bahwa KPU Kota Jayapura selanjutnya mengesahkan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Jayapura Jayapura pada distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura dan Distrik Heram, atas pengesahan yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura, saksi peserta pemilu melakukan keberatan, terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta Pemilu;

qq. Bahwa atas hasil hasil perolehan suara untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura pada 4 (empat) Distrik se-Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil yang dilaksanakan oleh PPD pada Distrik Jayapura Utara, PPD Jayapura Selatan, PPD Abepura dan PPD Heram. (*Bukti PK.34.21-7 s/d 10*)

rr. Bahwa berdasarkan hasil penanganan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terdapat laporan yang diajukan oleh Partai Golkar:

- Bahwa pada tanggal 23 April 2019, pukul 11.30 WIT, Bawaslu Kota

ss. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Lanny Jaya dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan 07 Mei 2019, dengan pembacaan hasil oleh PPD masing-masing distrik berdasarkan DA1 untuk semua jenis Pemilihan; (*vide Bukti PK-34.15- 04*)

tt. Bahwa berdasarkan sertifikat hasil rekapitulasi tingkat kabupaten (DB1-DPR) yang direkap berdasarkan hasil pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian		Hasil perolehan suara berdasarkan DB1-DPR Kabupaten Lanny Jaya sesuai hasil pengawasan.
A1	4. GOLKAR	
A2	1. Paskalis Kossay, S.Pd, MM.	0
	2. Trivena Tinal	0
	3. Elion Numberi	0
	4. Sahmud Basri Ngabalin	0
	5. Adolof Siburian	0
	6. Utik Koesminim	0

	7. Azis Samuel	0
	8. Rudy Jundani	0
	9. Dra. Hulda Ida Imbri	0
	10. Yakobus Jagong, STP.	0
Total Perolehan Suara (A1 + A2)		

(vide Bukti PK-34.15- 12)

uu. Bahwa sertifikat hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Lanny Jaya untuk seluruh jenis pemilihan (DB1-KPU) disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya setelah pengesahan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten ditetapkan oleh KPUD Lanny Jaya;

vv. Terhadap rekapitulasi yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Lanny Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 091/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 atas adanya keberatan saksi terhadap hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh KPUD Lanny Jaya, yang intinya adalah memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua hal-hal sebagai berikut:

- Hasil perhitungan dan perolehan suara tingkat kabupaten yang akan disampaikan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya di skors dan dilakukan pencocokan data;
- Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk membuka Kotak Suara kemudian melakukan pembetulan sesuai dengan data yang akan disandingkan oleh Saksi, KPU Kabupaten Lanny Jaya dan Bawaslu Lanny Jaya;
- Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya untuk mengawasi pencocokan data tersebut. (*vide Bukti PK-34.15- 16*)

ww. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 091/K.Bawaslu- Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Lanny Jaya dengan dilakukannya Pencocokan data yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2019 di Hotel Grand Abe Jayapura, tempat pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Papua. (*vide Bukti PK-34.15-17*)

2.12.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

2.12.3.1 Terhadap dalil Permohonan (4.1.2.3 Hal 23) yang menyebutkan perolehan suara pemohon di Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebanyak 36 sedangkan perolehan suara Steven Arebo yang semua mendapat suara sebanyak 337 suara menggelembung menjadi 1381 suara serta akibat penggelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga Pemohon yang seharusnya mendapatkan suara terbanyak di internal partai akhirnya kalah selisih suara dari caleg partai Golkar lainnya yaitu atas nama Steven Arebo. Terkait hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut

- a. Bahwa sesuai Pengawasan Tahapan Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan suara dan Pleno Terbuka tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, telah dilaksanakan dari **tanggal 3-4 Mei 2019 di Gedung Silas Papare Serui** dan **tanggal 9 Mei 2019 di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Jalan Maluku Serui**.
- b. Bahwa dalil Pemohon Pokok Permohonan yang menyebutkan bahwa Pemohon hingga saat ini belum mendapatkan formulir model DB dan hanya mendapatkan dua form model DA1 dengan perolehan suara yang

berbeda. Dalam Pleno KPU tingkat Kabupaten, telah dilakukan penyandingan data dan ditetapkan dalam tabel berikut :

Tabel 16. Daftar Perolehan Suara Partai berdasarkan DA1 DPRD Kab/Kota untuk Daerah Pemilihan 2, sesuai Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Anotairei	Angkaisera	Yawakukat	Jumlah Total Suara Partai
1	PKB	247	79	14	340
2	GERINDRA	390	423	188	1.001
3	PDIP	488	545	458	1.491
4	GOLKAR	1.329	1.381	173	2.883
5	NASDEM	517	20	54	591
6	GARUDA	535	0	52	587
7	BERKARYA	401	183	37	621
8	PKS	214	176	126	516
9	PERINDO	1.099	754	549	2.402
10	PPP	760	587	115	1,462
11	PSI	922	631	52	1.605
12	PAN	298	298	382	978
13	HANURA	1.264	184	44	1.492

14	DEMOKRAT	2.626	1.287	674	4.587
19	PBB	122	0	53	175
20	PKPI	6	0	16	22
Jumlah Suara Sah		11.212	6.548	3.007	20.767

Sumber : Dokumen DA1 DPRD Kab/Kota Distrik Anotare, Angkaisera, dan Yawakukat; *(Bukti PK 34.3- 21) DA1 DPRD kab distrik Anotare, Angkaisera dan Yawakukat*

2.12.3.2 Terhadap dalil Permohonan (4.1.2.4 Hal 25) yang menyebutkan Pemohon Caleg Nomor urut 3 atas nama Irina Wenda Pada distrik Nogi memperoleh 369 suara yaitu 7 suara dari kampung Yogobak, 214 suara dari kampung Yirine, 23 suara dari kampung Wimalome, 5 suara dari kampung Weneogun, 50 suara dari kampung Libuga, 58 suara dari kampung Berangwi, 11 suara dari kampung Wunom dan 1 suara dari kampung kwenukwi. Namun pada tingkat distrik DPD dan PANWAS mengalihkan kepada partai Demokrat secara sepihak serta Pemohon pada distrik Tiom memperoleh 127 suara yaitu pada 1 kelurahan dan 10 kampung. Namun pada tingkat distrik DPD dan panwas mengalihkan kepada partai bulan bintang dan partai Nasdem secara

sepihak dan pemohon pada distrik Yiginua memperoleh 1817 suara yaitu 280 suara dari kampung Ninengwa, 1 suara dari kampung Abua, 8 suara dari kampung Ninabua dan 1550 suara dari kampung Gumagame. Namun pada tingkat distrik PPD dan panwas mengalihkan kepada partai bulan bintang secara sepihak. Pemohon pada distrik Minami memperoleh 330 suara yaitu dari kampung Dugume sebesar 130 suara dari kampung Kulumburu sebesar 100 suara dan kampung molobok sebesar 100 suara namun pada tingkat distrik PPD dan panwas mengalihkan kepada partai lain secara sepihak dan pemohon pada distrik Yugungwi Kampung Konikme memperoleh 21 suara. Namun pada tingkat distrik PPD dan panwas mengalihkan kepada partai Nasdem secara sepihak. Atas laporan kecurangan PPD dan panwas tersebut telah mengakibatkan pemohon kehilangan suara sebanyak 2664 atau hasil perolehan akhir pada rekapitulasi KPU Lanny jaya menjadi 0 (nol), sehingga pemohon tidak mendapatkan kursi. Atas tindakan pengalihan suara pemohon tersebut kepartai lain secara sepihak telah dilaporkan kepada Bawaslu Lanny Jaya (Vide Formulir Model B.3 tanggal 13 Mei 2019, Bukti P.1. dan Tanda Terima Bukti

Penerimaan Laporan kepada Bawaslu Lanny Jaya tanggal 13 Mei 2019, Bukti P.2.). Laporan kecurangan PPD dan panwas tersebut sampai dengan saat ini tidak ada tindakan apapun atau respon untuk menindaklanjuti laporan pemohon hal ini jelas bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait pemilu serta sangat merugikan hak politik pemohon karenanya mohon kepada mahkamah untuk memerintahkan KPU Lanny Jaya mengembalikan perolehan suara pada dapil 1 (5 Distrik) tersebut kepada pemohon sebanyak 2664 suara dan mengurangi perolehan suara partai Nasdem partai bulan bintang partai Demokrat dan partai lainnya yang memperoleh penggelembungan suara secara inkonstitusional atau setidaknya mendiskualifikasi masing-masing caleg Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang dan Partai Demokrat pada dapil 1. Mengenai hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Distrik Nogi, bahwa rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019 di distrik Nogi; (*Bukti PK-34.15-26*)

- b. Bahwa pada rapat rekapitulasi tingkat Distrik, PPD berdasarkan atas C1 dari masing-masing TPS;
- c. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat distrik, dari C1 yang disalin kedalam DA1, diperoleh rincian sebagai berikut:

No.	Kelurahan / Kampung	Perolehan Suara, untuk Pemohon an. Irina Wenda berdasarkan DA1-DPRD hasil Pengawasan Distrik Nogi
1.	Yogobak	0
2.	Yirene	0
3.	Wimalome	0
4.	Waneogun	0
5.	Libuga	0
6.	Berangwi	0
7.	Winom	0
8.	Kwenukwi	0
TOTAL		

(Bukti PK-34.15-27)

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Distrik Tiom, bahwa rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019 di distrik Tiom; (Bukti PK-34.15- 28)

- e. Bahwa pada rapat rekapitulasi tingkat Distrik, PPD berdasarkan atas C1 dari masing-masing TPS;
- f. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat distrik, dari C1-DPRD yang disalin kedalam DA1-DPRD, diperoleh rincian sebagai berikut:

No.	Kelurahan / Kampung	Perolehan Suara, untuk Pemohon an. Irina Wenda berdasarkan DA1-DPRD hasil Pengawasan Distrik Tiom
1.		0
2.		0
TOTAL		

(Bukti PK-34.15-29)

- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Distrik Yuginua, bahwa rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 21 April 2019 di distrik Yigunua; (Bukti PK-34.15- 30)
- h. Bahwa pada rapat rekapitulasi tingkat Distrik, PPD berdasarkan atas C1 dari masing-masing TPS;
- i. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat distrik, dari C1-DPRD yang disalin kedalam DA1-DPRD, diperoleh rincian sebagai berikut:

No.	Kelurahan / Kampung	Perolehan Suara, untuk Pemohon an. Irina Wenda berdasarkan DA1-DPRD hasil Pengawasan Distrik Yiginua
1.	Ninengwa	0
2.	Abua	0
3.	Ninabua	0
4.	Gumagame	0
TOTAL		

(Bukti PK-34.15-31)

- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Distrik Niname, bahwa rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019 di distrik;
(Bukti PK-34.15-32)
- k. Bahwa pada rapat rekapitulasi tingkat Distrik, PPD berdasarkan atas C1 dari masing-masing TPS;
- l. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat distrik, dari C1-DPRD yang disalin kedalam DA1-DPRD, diperoleh rincian sebagai berikut:

No.	Kelurahan / Kampung	Perolehan Suara, untuk Pemohon an. Irina Wenda berdasarkan DA1-DPRD hasil Pengawasan Distrik Niname
-----	------------------------	--

1.	Dugume	0
2.	Kulumbu	0
3.	Molobok	0
TOTAL		

(Bukti PK-34.15-33)

- m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Distrik Yugungwi, bahwa rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019 di distrik Yugungwi; (Bukti PK-34.15-34)
- n. Bahwa pada rapat rekapitulasi tingkat Distrik, PPD berdasarkan atas C1 dari masing-masing TPS;
- o. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat distrik, dari C1-DPRD yang disalin kedalam DA1-DPRD, diperoleh rincian sebagai berikut:

No.	Kelurahan / Kampung	Perolehan Suara, untuk Pemohon an. Irina Wenda berdasarkan DA1-DPRD hasil Pengawasan Distrik Yugungwi
1.	Konikme	0
TOTAL		

(Bukti PK-34.15-35)

- p. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 pelapor atas nama Irina Wenda melaporkan terkait adanya

penghilangan suara; (*Bukti PK-34.15-36*)

q. Bahwa terhadap laporan tersebut, telah ditindaklanjuti untuk dilakukan pengkajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya; (*Bukti PK-34.15-37*)

r. Bahwa terhadap Kajian Awal tersebut Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya telah mengeluarkan status laporan untuk di umumkan; (*Bukti PK-34.15-38*)

2.12.3.3 Terhadap dalil Permohonan (4.1.2.5 Hal 26) yang menyebutkan suara pihak terkait dari 3372 (kolom pemohon) menjadi 3663 (kolom termohon) dikarenakan sebagai berikut terjadi penambahan suara di distrik Gelok Beam sebanyak 291 suara sesuai dengan bukti pada formulir da1 DPRD kabupaten kota kecamatan distrik Gelok Beam suara pihak terkait mendapatkan 0 suara akan tetapi pada formulir DB1 telah bertambah menjadi 291 suara sertab suara pemohon dari 3880 kolom pemohon berkurang sebanyak 794 sehingga menjadi 3086 kolom termohon yang terjadi di 17 TPS di distrik Gelok Beam dan 2 TPS distrik gamelia. Maka terkait hal itu Bawaslu Provinsi Papua Menerangkan Sebagai Berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh pengawas Distrik Gelok Beam,

rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019 Yang dilaksanakan di Gelok Beam; (*Bukti PK-34.15-39*)

- b. Bahwa dalam rekapitulasi tersebut PPD Distrik Gelok Balem melakukan rekapitulasi berdasarkan data C1-DPRD dari masing-masing TPS.
- c. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang disampaikan, yang kemudian dimasukan kedalam DA1-DPRD kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota Hasil Pengawasan untuk Distrik Gelok Beam
1.	PKB	
2.	GERINDRA	
3.	PDI Perjuangan	
4.	GOLKAR	3.089
5.	NASDEM	
6.	GARUDA	291
7.	BERKARYA	
8.	PKS	
9.	PERINDO	

10.	PPP	
11.	PSI	
12.	PAN	90
13.	HANURA	
14.	DEMOKRAT	
19.	PBB	211
20.	PKPI	

(Bukti PK-34.15-40)

2.12.3.4 Terhadap dalil Permohonan (4.1.2.6 Hal 29) yang menyebutkan perolehan suara sesuai dengan DA-1, adalah sebagai berikut **ANDUR W. TABUNI** Caleg Nomor Urut 1 dari PARTAI POLITIK GOLKAR Perjuangan yang awalnya **3859** suara (**Vide Bukti P4-...**) dan Perolehan suara **TANUS KOGOYA S.Pd** Caleg Nomor urut 1 dari Partai Politik PERINDO adalah **4213** suara; (**Vide Bukti P4-... DA 1 – DPRD**) serta adanya perubahan perolehan suara, dimana Pembacaan pada KPU Kabupaten Lanny Jaya, telah membacakan Hasil Suara sebagai berikut atas Nama ANDUR W. TABUNI Caleg Nomor urut 1 dari PARTAI POLITIK GOLKAR yang awalnya 3859 suara menjadi 2.027 (berdasarkan temuan dilapangan DA1-DPRD yang diberikan oleh PPD serta tidak merekap perolehan suara pemohon dan untuk Perolehan Suara Pemohon Caleg

Nomor Urut 1 atas nama ANDUR W. TABUNI pada kampung Longgabur distrik Bruwa sebanyak 1832. Kemudian terjadi penambahan suara kepada TANUS KOGOYA S.Pd Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Politik PERINDO awalnya 4213 suara menjadi 6.045 (berdasarkan keterangan saksi YOIS TABUNI), dan Faktanya selama ini Pemohon tidak pernah mendapatkan rekapan C1 dan DB1 dari PPD. Maka berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan sebagai berikut

- a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan, rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik Bruwa dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019, bertempat di Distrik Bruwa; (*Bukti PK-34.15-41*)
- b. Bahwa berdasarkan DA1-DPRD yang disampaikan dari Panwas Distrik kepada Bawaslu Lanny Jaya dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPRD Distrik Bruwa Hasil Pengawasan	
A1	Partai Golongan Karya	
A2	Andur W. Tabuni	2.027
	Revin Tabuni, S.Pd.	0
	Fanny Wulandary Tabuni	0

	Selius Wenda	0
	Giman Telenggen	0
	Mapi Wenda	0
	Jasmina Kogoya	0
	Reik G. Kogoya	0
	Dalius Tabuni	0
Jumlah Suara Partai + Calon		
A1	Partai Persatuan Indonesia	
A2	Tanus Kogoya	6.045
	Serlih H. Wenda	0
	Nino Wenda, A.md. S.Sos	0
	Mendise Wanena, SE	0
	Yeru Morib, Sip.	0
	Ukki Tabuni	0
	Yeli Tabuni	0
	Dulius Wanimbo	0
	Frans G. Wenda, S.Sos.	0
Jumlah Suara Partai + Calon		

(vide Bukti PK-34.15-25)

- c. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara untuk Distrik Bruwa tingkat Kabupaten Lanny Jaya dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2019, yang dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Bruwa berdasarkan DA1-DPRD Kabupaten/kota; (Bukti PK-34.15-04)
- d. Bahwa hasil yang disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi telah dicermati oleh Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya terhadap dokumen DA1-DPRD Kabupaten/kota hasil pengawasan dengan yang sesuai.

2.12.3.5 Terhadap dalil Permohonan (4.1.2.7 Hal 31) yang menyebutkan rekap kelurahan dan Kampung dapil Pemohon (7 Kelurahan dan 1 Kampung) atau sesuai dengan data C1 dengan C1 Plano, perolehan suara No. Urut 2 atas nama ULRIKE ST LATUMAHINA, S.H adalah sebesar 1021 suara, No. urut 7 atas nama OKTOVINA NASATEKAY, S.Sosadalah sebesar 416 suara dan Pemohon adalah sebesar 1326 suara dengan cara menambahkan dan mengurangi perolehan suara masing-masing caleg partai Golkar. Penambahan dan pengurangan suara yang demikian mengakibatkan terjadinya pengurangan suara yang sangat signifikan pemohon yaitu dari 1326 suara nomor 2 terbanyak menjadi 1168 suara nomor 5 terbanyak

serta Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya menolak rekap DA1 dan menghitung ulang C1 Plano namun tidak dilaksanakan oleh KPU Jayapura. Terkait hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, pada tanggal 20 Mei 2019 mengenai pengawasan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kota Jayapura; (*Bukti PK.34.21-12*)
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura Utara dan Tingkat KPU Kota Jayapura, untuk perolehan suara DPRD Kota Jayapura Partai Golongan Karya adalah sebagai berikut:

PARTAI	DA1	DB1	SELISIH
Partai Golongan Karya	11.490	11.490	0

- c. Bahwa atas Proses dan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat DPRD Kota Jayapura, Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi

Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Utara pada tanggal 16 Mei 2019; (*Bukti PK.34.21-13 s/d 15*)

- d. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang termuat dalam Model DA1 Kabupaten/Kota distrik Jayapura Utara yang hendak dimuat menjadi hasil perolehan suara pada Model DB1 Kabupaten/Kota KPU Kota Jayapura; (*Bukti PK.34.21-10*)
- e. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan koordinasi dan meminta petunjuk tertulis kepada KPU Provinsi Papua atau KPU RI terkait pelaksanaan pleno pada tanggal 19 Mei 2019. Saran perbaikan ini disampaikan oleh Bawaslu Kota Jayapura mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi telah melewati batas tahapan rekapitulasi; (*Bukti PK.34.21-11*)
- f. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta Pemilu pada saat pelaksanaan Pleno

Rekapitulasi Tingkat Kota Jayapura, KPU Kota Jayapura meminta semua peserta Pemilu untuk menyampaikan keberatannya dengan mengisi form keberatan DB2.KPU dan Saksi Partai Golongan Karya atas nama Simon P. Latue menyampaikan Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan Kejadian Khusus; (*Bukti PK.34.21-51*)

- g. Bahwa KPU Kota Jayapura selanjutnya mengesahkan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Jayapura Jayapura pada Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura dan Distrik Heram;
- h. Bahwa terhadap hasil perolehan suara untuk pemilihan calon anggota DPRD kota Jayapura pada empat distrik tersebut, Bawaslu Kota Jayapura tetap pada pendirian awal, yakni keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil yang dilaksanakan oleh PPD pada distrik Jayapura Utara, PPD Jayapura Selatan, PPD Abepura dan PPD Heram; (*Bukti PK.34.21-7 s/d 10*)
- i. Bahwa berdasarkan hasil penanganan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terdapat laporan yang diajukan oleh Partai Golkar:
 - Bahwa pada tanggal 23 April 2019, pukul 11.30 WIT, Bawaslu Kota Jayapura memeriksa laporan yang

diajukan oleh Sdr. Hadirat Sonifati Zega dari Partai Golkar dengan Nomor Laporan 011/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAP URA/33.01/V/2019 terkait dengan adanya dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh KPPS TPS 01 Kampung Waena, TPS 33 Kelurahan Hedam Distrik Heram, tps 58 dan tps 52 Kelurahan Imbi, yang selanjutnya laporan tersebut diperiksa oleh Bawaslu Kota Jayapura; (*Bukti PK.34.21-48*)

- Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal oleh Bawaslu Kota Jayapura, laporan yang diajukan oleh Sdr. Hadirat Sonifati Zega tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) mengenai syarat formil dan materil laporan; (*Bukti PK.34.21-49*)
- j. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang berisi tentang laporan yang diajukan oleh Sdr. Hadirat onifati Zega tidak dapat ditindaklanjuti; (*Bukti PK.34.21-50*)

2.12.3.6 Terhadap dalil Permohonan (4.1.2.8 Hal 32) yang menyebutkan Bahwa berdasarkan rekapitulasi Pemohon mendapatkan suara sebesar 6568 suara dan PDIP mendapatkan 8304 suara sehingga selisih antara pemohon partai Golkar dengan PDIP sebesar 1796 suara yang didasarkan pada formulir DA1 DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan perhitungan tersebut kursi ke-10 (sepuluh), dapil Jayapura Selatan ditetapkan diperoleh oleh PDIP, karena rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi untuk Dapil Jayapura Selatan serta Pemohon menemukan adanya penggelembungan suara pada suara PDIP antara rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dengan Formulir C1-DPRD yang dimiliki oleh Pemohon dan pada tanggal 12 Mei 2019, Termohon bersama dengan Bawaslu kota Jayapura dan para saksi peserta pemilu bersepakat bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Jayapura untuk distrik Jayapura Selatan terjadi ketidakcocokan data sertifikasi jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah tidak sesuai dengan rekapitulasi dalam form DAA1 pada kelurahan atau kampung pada distrik Jayapura Selatan untuk pemilihan DPRD dan DPRD Kota Jayapura, kesepakatan

tersebut dituangkan dalam bentuk **Berita Acara nomor : 57/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019** tentang sinkronisasi data sertifikasi dan hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum 2019 distrik Jayapura Selatan (*Vide Bukti P.4-1*) Kemudian saksi pemohon dan saksi saksi partai lain menolak hasil rekapitulasi di tingkat kota Jayapura karena hasil rekapitulasi DAA1 tingkat kecamatan tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat TPS dan terhadap permasalahan tersebut kemudian Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan surat 305/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 perihal rekomendasi yang pada pokoknya meminta kepada termohon KPU kota Jayapura untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara serta pemilu dengan merujuk pada C1 Plano untuk pemilihan calon anggota DPRD dan DPRD kota Jayapura pada distrik Jayapura Selatan, namun rekomendasi tersebut hanya dilakukan untuk sinkronisasi perhitungan anggota DPRD saja, Termohon beralasan bahwa tidak terdapat cukup waktu untuk melaksanakan sinkronisasi data C1 Plano anggota DPRD kota Jayapura dan dikarenakan termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu kota Jayapura di atas kemudian Bawaslu kota

Jayapura mengeluarkan surat dengan nomor : 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 mei 2019 perihal pernyataan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada tingkat distrik Jayapura, (Bukti P.4-2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu kota Jayapura keberatan dan tidak menerima merekomendasikan untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara peserta pemilu dengan merujuk pada C1 Plano untuk pemilihan calon anggota DPRD dan DPRD kota Jayapura pada distrik Jayapura Selatan. meskipun telah terjadi penolakan hasil rekapitulasi dari Bawaslu Kota Jayapura maupun saksi-saksi partai politik namun Termohon tidak mengindahkan keberatan tersebut Termohon tetap menetapkan hasil rekapitulasi di tingkat Kota Jayapura dengan dasar yang tidak sesuai C1 untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kota Jayapura dengan alasan bahwa batas waktu tahapan sudah selesai sebagaimana berita acara Nomor : 60/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kota Jayapura pemilihan umum tahun 2019 (Bukti P.4-4) serta PPD distrik Jayapura Selatan tidak pernah memberikan salinan DAA1 kepada saksi-

saksi peserta pemilihan maupun kepada panwas distrik, hal tersebut patut diduga bahwa PPD distrik Jayapura Selatan telah merubah perolehan suara dari C1 ke form DAA1 dengan tujuan untuk memberikan suara kepada salah satu calon peserta pemilihan. Bahwa hal tersebut sebagaimana bukti *screenshot* WA PPD distrik kepada beberapa lurah di distrik Jayapura Selatan untuk merubah hasil C1 yang kemudian berpengaruh kepada perolehan hasil suara pemohon. hal tersebut pula diperkuat dengan adanya penangkapan 2 anggota PPD distrik oleh anggota polres Jayapura dengan barang bukti berupa nominal uang pecahan seratus ribu dan 2 buah handphone. Bahwa dari handphone yang disita terdapat murah percakapan (chat wa) perintah untuk merubah hasil perolehan suara. Kedua PPD tersebut sekarang masih diperiksa oleh polres kota Jayapura dan berdasarkan alasan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam melakukan proses rekapitulasi di tingkat distrik maupun di tingkat Kota Jayapura untuk rekapitulasi distrik Jayapura Selatan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut diatas sangat berpengaruh kepada perolehan hasil

suara Pemohon, karena hasil yang ditetapkan oleh Termohon tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara di tingkat TPS, yang mengakibatkan adanya penambahan suara untuk partai PDIP perjuangan yang mengakibatkan perolehan kursi pemohon berdasarkan perhitungan suara menjadi berkurang sebanyak 1 (satu) kursi. Terjadinya penggelembungan perolehan suara PDIP di Dapil 1 Jayapura Selatan sebanyak 2530 suara menyebabkan bertambahnya satu kursi di Kota Jayapura dapil 1 Jayapura Selatan dan berkurangnya 1 kursi untuk pemohon partai Golkar dan berdasarkan uraian orang tersebut diatas terbukti bahwa perolehan suara partai PDIP diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar dan patut untuk dibatalkan Mahkamah. Maka berkaitan dengan hal itu Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 mengenai laporan pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kota Jayapura, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan dilaksanakan pada tanggal 23 April

2019, bertempat di Ruko Entrop, dan di pindahkan ke Hotel Aston Jayapura pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019; (*Bukti PK.34.21-22*)

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan dan Tingkat KPU Kota Jayapura, untuk perolehan suara DPRD Kota Jayapura Partai Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebagai berikut:

PARTAI	DA1	DB1	SELISIH
Partai Golongan Karya	6.508	6.508	0
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.304	8.304	0

- c. Bahwa atas Proses dan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat DPRD Kota Jayapura, Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 315 /K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 16 Mei 2019; (*Bukti PK.34.21-23, 14 & 24*)

- d. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara terdapat keberatan yang di sampaikan oleh saksi peserta pemilu, hal tersebut disebabkan oleh ketidakcocokkan data sertifikasi jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah tidak sesuai dengan dengan Model DAA1 pada Kelurahan/Kampung di Distrik Jayapura Selatan untuk pemilihan anggota DPR Papua dan pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura. bahwa data yang dimiliki saksi peserta Pemilu dan PPD tidak sinkron, keberatan saksi peserta pemilu tersebut telah dilakukan upaya penyangdingan data bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Jayapura Selatan untuk DAA1, namun tidak terlaksana karena panitia pengawas distrik Jayapura Selatan dan saksi peserta pemilu tidak diberikan data berupa DAA1, sebagai data pembanding antara data PPD dan data panitia pengawas distrik Jayapura Selatan dan saksi peserta pemilu;
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada Tingkat Kota Jayapura, termasuk data hasil perolehan suara Model DA1.KPU Distrik Jayapura Selatan,

saat penyampaian perolehan suara tersebut, terdapat keberatan yang diajukan saksi peserta pemilu atas ketidak sinkronan antara data yang dimiliki PPD Jayapura Selatan dengan data saksi peserta pemilu, sehingga KPU Kota Jayapura selanjutnya membuat Berita Acara Sinkronisasi Data Sertifikasi dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan yang di tandatangani oleh Komisioner KPU Kota Jayapura dan para saksi peserta pemilu; (*Bukti PK.34.21-25*)

- f. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara terdapat keberatan yang di sampaikan oleh saksi peserta pemilu, hal tersebut disebabkan oleh ketidakcocokkan data sertifikasi jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah tidak sesuai dengan dengan Model DAA1 pada Kelurahan/Kampung di Distrik Jayapura Selatan untuk pemilihan anggota DPR Papua dan pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura. bahwa data yang dimiliki saksi peserta Pemilu dan PPD tidak sinkron, keberatan saksi peserta pemilu tersebut telah dilakukan upaya penyandingan data bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Jayapura Selatan untuk DAA1, namun

tidak terlaksana karena panitia pengawas distrik Jayapura Selatan dan saksi peserta pemilu tidak diberikan data berupa DAA1, sebagai data pembandingan antara data PPD dan data panitia pengawas distrik Jayapura Selatan dan saksi peserta pemilu;

- g. Bahwa sebagian besar saksi peserta pemilu meminta untuk menampilkan data DAA1 Plano, namun PPD Jayapura Selatan tidak melengkapi dan menyampaikan data dimaksud, sehingga rekapitulasi perhitungan suara mengacu pada C1 Hologram, namun masih juga tidak ada kecocokkan antara data saksi dan PPD Distrik Jayapura Selatan, sehingga data rekapitulasi perhitungan suara mengacu pada C1 plano, maka dengan mempertimbangkan permintaan para saksi peserta Pemilu untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara, maka Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara peserta Pemilu dengan mengacu pada C1 Plano, sehingga rekapitulasi perhitungan suara ulang yang dilakukan KPU Kota Jayapura dan PPD Distrik Jayapura Selatan, mengacu

pada data C1 Plano; (*Bukti PK.34.21-26*)

- h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, KPU Kota Jayapura dan PPD Jayapura Selatan tidak dapat menyelesaikan Perhitungan Suara Ulang dengan menggunakan data C1 Plano untuk pemilihan calon anggota DPRD Kota Jayapura, Rekapitulasi Perhitungan Suara Ulang dengan mengacu pada data C1 Plano hanya dapat dilakukan hingga perhitungan suara Calon Presiden, DPD, DPR dan DPR Provinsi Papua, dengan alasan dari KPU Kota Jayapura, bahwa tidak terdapat waktu yang cukup untuk menyelesaikan perhitungan suara hingga tingkat Calon DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan data yang mengacu pada data C1 Plano, sehingga KPU Kota Jayapura meminta saksi peserta pemilu untuk menyampaikan keberatan dalam bentuk tertulis dalam Form Model DB2 dan saksi Partai Golongan Karya atas nama Simon P. Latue dan Riko F. Walubun, menyerahkan Surat Keberatan atau Catatan Kejadian khusus; (*Bukti PK.34.21-52 & 53*)
- i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 telah di keluarkan Surat Rekomendasi Nomor 315/K.Bawaslu-

Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan; (*Bukti PK.34.21-9*)

- j. Bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, KPU Kota Jayapura membacakan DA1.KPU untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura dan dikonversi menjadi DB1.KPU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura, bahwa Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan saran kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan koordinasi dan meminta petunjuk tertulis kepada KPU Provinsi Papua atau KPU RI terkait pelaksanaan pleno, mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi telah melewati batas tahapan rekapitulasi perhitungan suara untuk tingkat Kabupaten/Kota; (*Bukti PK.34.21-11*)
- k. Bahwa atas hasil hasil perolehan suara untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura pada 4 (empat) Distrik se-Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura keberatan dan tidak dapat

menerima proses dan hasil yang dilaksanakan oleh PPD pada Distrik Jayapura Utara, PPD Jayapura Selatan, PPD Abepura dan PPD Heram; (*Bukti PK.34.21-7 s/d 10*)

I. Bahwa berdasarkan hasil penanganan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terdapat laporan yang diajukan oleh Partai Golkar:

– Bahwa pada tanggal 24 April 2019, pukul 13.43 WIT, Bawaslu Kota Jayapura memeriksa laporan yang diajukan oleh Sdr. Safruddin R dari Partai Golkar dengan Nomor Laporan 014/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAPURA/33.01/V/2019 terkait dengan adanya dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh H. Umar Paddesa, yang selanjutnya laporan tersebut diperiksa oleh Bawaslu Kota Jayapura; (*Bukti PK.34.21-54*)

– Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal oleh Bawaslu Kota Jayapura, laporan yang diajukan oleh Sdr. Safruddin R tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) mengenai syarat formil dan materil laporan; (*Bukti PK.34.21-55*)

– Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang berisi tentang laporan yang diajukan oleh Sdr. Safruddin R tidak dapat ditindaklanjuti. (*Bukti PK.34.21-56*)

2.12.3.7 Terhadap dalil Permohonan (4.1.2.9 Hal 37) yang menyebutkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di distrik Kamu Utara sebanyak 1030 suara dikarenakan Termohon sengaja tidak mendasarkan hasil rekapitulasi yang benar pada distrik Kamu Utara pada saat rekapitulasi di Kabupaten Dogiyai (*bukti P-...*) juga terjadi penambahan perolehan suara bagi calon Caleg PDIP perjuangan nomor urut satu atas nama (Naftali Keiya, SE) di distrik Kamu Utara sebanyak 1034 suara dikarenakan Termohon tidak mendasarkan hasil rekapitulasi yang benar pada distrik Kamu Utara pada saat rekapitulasi di Kabupaten Dogiyai yang mengakibatkan pengurangan suara caleg nomor urut 2 pemohon sebanyak (*Bukti P-...*) dan perubahan perolehan suara tersebut telah diadukan kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai dan merekomendasikan pada pokoknya “supaya KPU Dogiyai melakukan pembetulan atau menormalisasi terhadap sertifikat hasil rekapitan perolehan suara tingkat distrik Kamu Utara DA1 dan

sertifikat hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai atas nama DEREK PIGAI Caleg partai Golkar nomor urut 2". Namun tidak dilaksanakan oleh KPU Dogiyai (Vide Bukti P. ... Formulir temuan Bawaslu Dogiyai dan Bukti P. ... rekomendasi Bawaslu dogiyai dan surat pernyataan DPD partai Golkar Dogiyai) dan terhadap perubahan tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Dogiyai oleh KPU Dogiyai telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon yaitu tidak lolos sebagai Caleg partai Golkar Dapil 1 Kamu Utara Kabupaten Dogiyai, yang seharusnya mendapat perolehan suara lebih besar dari calon lain (Caleg PDIP Perjuangan nomor urut 1 atas nama Naftali Keiya, SE.). Maka berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan **Panwas Distrik Kamu Utara** bahwa rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Kamu Utara dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019 di Kantor Distrik Kamu Utara Kampung Idakebo, ada pun perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten berdasarkan DA-1 adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA
1	GOLKAR	YOHANA GOO	1.066
2.		DEREK PIGAI	1.054
3.	PDI-P	NAFTALI KEIYA	814
4.		LAORENSIUS GOO, S.Sos	1.727
5.		YANI BOBI	30
6.		PILEMON PIGAI	12
7.		PAULINA GOO	1.075

(Bukti PK 34.18-7)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten untuk perolehan suara pemohon berdasarkan DB1 DPRD Kabupaten **pada kolom distrik Kamu Utara** adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA
1	GOLKAR	YOHANA GOO	1.066
2.		DEREK PIGAI	24
3.	PDI-P	NAFTALI KEIYA	1.744
4.		LAORENSIUS GOO, S.Sos	1.827
5.		YANI BOBI	30
6.		PILEMON PIGAI	12

7.	PAULINA GOO	1.075
----	-------------	-------

(bukti PK 34.18-8)

- c. Bahwa pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 01 Mei 2019, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar termasuk keberatan dari ketua DPC Partai Golkar terkait perubahan perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPRD Kabupaten Distrik Kamu Utara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten atas nama Derek Pigai. Atas keberatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Dogiyai sudah menyampaikan saran Perbaikan secara lisan berpedoman pada peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019, tetapi KPU Kabupaten Dogiyai tidak menanggapi dan langsung menetapkan hasil tersebut;
- d. Bahwa terdapat laporan dari Pemohon atas nama Yusak Ernest Tebai sebagai Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Dogiyai dengan nomor laporan 005/LP/bawaslu-dgy/33.27/V/2019 tentang perubahan perolehan suara atas nama Derek Pigai Calon Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Dapil 1. Atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Dogiyai telah melakukan penanganan laporan dugaan pelanggaran sebagai berikut :

- Membuat kajian awal atas laporan tersebut dan di nyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil;
- Mengeluarkan Rekomendasi Nomor:

006/Rek/Bws.dgy/33.27/V/2019

tertanggal 20 Mei 2019 yang di tujukan kepada KPU Kabupaten Dogiyai. Adapun isi Rekomendasi tersebut berdasarkan pasal 380 (ayat 1) UU No.7 tahun 2017 KPU kabupaten dogiyai melakukan pembedulan /menormalisasi terhadap sertifikat hasil Rekapan perolehan suara tingkat distrik kamu utara DA1 dan sertifikat hasil perolehan suara tingkat kabupaten dogiyai atas nama Derek Pigai Partai GOLKAR Nomor urut 02; *(bukti PK 34.18-9)*

- e. KPU Kabupaten Kabupaten Dogiyai tidak menindak lanjuti Rekomendasi tersebut dengan alasan Rekomendasi tersebut tidak di tanda tangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Dogiyai dan tidak ada stempel lembaga Bawaslu Kabupaten Dogiyai;
- f. Bahwa pada tanggal 20 mei 2019 bawaslu kabupaten dogiyai mengeluarkan surat No: 006/Rek/BWS-DGY/33.27/V/2019 tertanggal 20 mei yang

menyampaikan: Menormalisasi atau memperbaiki Rekapitan Kabupaten sesuai DA1 Rekapitan distrik Kamu utara.

2.13 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 194.05.33

2.13.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua

2.13.1.1 Terhadap dalil Pemohon (4.5.1 - 4.5.4)

yang menyebutkan bahwa telah terjadinya perbedaan angka perolehan suara antara DB1 yang diberikan termohon kepada pemohon dengan DC1 hasil Rekapitulasi di KPU Provinsi. Juga pada tanggal 5 Mei 2019 dari 132 TPS di distrik Yapen Selatan, PPD Yapen Selatan tidak menyelesaikan hasil rekapitulasi secara keseluruhan yaitu hanya 3 TPS yang mampu dilakukan rekapitulasi, Dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, telah dikeluarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 359/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019, yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Yapen dengan mengeluarkan Surat nomor : 126/PP.05.1/9105/KPU-KAB/V/2019 tanggal, 5 Mei 2019 yang bersifat penting kepada Ketua dan anggota PPD Yapen Selatan yang memerintahkan Ketua dan Anggota PPD distrik Yapen Selatan untuk segera melaksanakan Rekapitulasi perolehan

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Papua ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah di setujui dan di putuskan dalam Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**



METUSALAK INFANDI, SH.

ANGGOTA

AMANDUS SITUMORANG, SH.,MH

ANGGOTA

JAMALUDDIN LADO RUA, SH.,MH

ANGGOTA

TJIPTO WIBOWO, S.Pd.,M.Si

ANGGOTA

NIKO TUNJANAN, SS

ANGGOTA

RONALD MANOACH, ST

ANGGOTA

ANUGRAH PATA, SH

Kode Klasifikasi Bukti	Keterangan
PROVINSI PAPUA	
PK.34 -1	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -2	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -3	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor:084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -4	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -5	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -6	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 87/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -7	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -8	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -9	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -10	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -11	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -12	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -13	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -14	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

PK.34 -15	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -16	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -17	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -18	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -19	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -20	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -21	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -22	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -23	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -24	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk pembacaan Kabupaten Kepulauan Yapen
PK.34 -25	Surat Keputusan KPU Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan system noken/ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
PK.34 -26	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk penyandingan data Kabupaten Yahukimo

PK.34 -27	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk kedatangan KPU Kabupaten Tolikara
PK.34 -28	Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Papua terkait Logistik Pemilu Kabupaten Tolikara pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua
PK.34 -29	Surat Pelimpahan Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Papua kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara terkait Kepala Distrik yang membawa Kotak Suara dari Distrik Kanggime di Tolikara
PK.34 -30	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Paniai
PK.34 -31	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -32	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Dogiayi
PK.34 -33	Formulir Model DC1 DPD Provinsi Papua
PK.34 -34	Formulir DB1 PPWP, Formulir DB1 DPR RI, Formulir DB1 DPD, Formulir DB1 DPRP dan Formulir DB1 DPRD Kabupaten Keerom
PK.34 -35	Formulir DB1 PPWP, Formulir DB1 DPR, Formulir DB1 DPD dan Formulir DB1 DPRD Kabupaten Yahukimo
PK.34 -36	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk penyandingan data Kabupaten Yahukimo
PK.34 -37	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

PK.34 -38	Formulir Model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten Jayawijaya
PK.34 -39	Status Laporan Bawaslu Provinsi Papua terkait Kepala Distrik yang membawa Kotak Suara dari Distrik Kanggime di Tolikara
PK.34 -40	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -41	Formulir Model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten Tolikara
PK.34 -42	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -43	Berita Acara KPU Provinsi Papua tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019
PK.34 -44	Tindak Lanjut unruk Laporan Sdr Hosea Genongga
KABUPATEN JAYAPURA	
PK.34.1 -1	Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor : 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019
PK.34.1 -2	Surat Jawaban KPU Kabupaten Jayapura Nomor: 83/kpu kab/030.659733/IV/2019
PK.34.1-4	Form A Pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
PK.34.1-5	Form alat kerja pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-6	Berita Acara Nomor 47/PP.05.1-BA/02/Kab/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani);
PK.34.1-7	C1 TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-8	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-9	C1 TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;

PK.34.1-10	Form A Pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-11	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 10 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-12	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 13 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-13	Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Hinekombe;
PK.34.1-14	Form A Pengawasan Pengawas TPS 25 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-15	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 15 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-16	Form A Pengawasan Pengawas TPS 31 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-17	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 33 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-18	Form A Pengawasan Pengawas TPS 34 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-19	1 (satu) lembar C6 atas nama Aillen J.R. Awes;
PK.34.1-20	Form A Pengawasan Pengawas TPS 40 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-21	2 (dua) lembar C6 atas nama Abdullah dan Suffaryati;
PK.34.1-22	Form A Pengawasan Pengawas TPS 41 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-23	Form A Pengawasan Pengawas TPS 46 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-24	Form A Pengawasan Pengawas TPS 54 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-25	1 (satu) lembar C6 atas nama Ones Wepsa;
PK.34.1-26	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 58 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;

PK.34.1-27	Form A Pengawasan Pengawas TPS 60 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-28	Form A Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-29	Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Sentani Kota Kecamatan Sentani;
PK.34.1-30	Berita Acara Nomor 44/PP.05.1-BA/02/Kab/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani);
PK.34.1-31	C1 TPS 13 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-32	Form A Pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-33	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 15 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-34	C1 TPS 16 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-35	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 20 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-36	Form A Pengawasan Pengawas TPS 25 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-37	Form A Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Hobong Distrik Sentani;
PK.34.1-38	Form A Pengawasan Pengawas TPS 02 Kampung Sereh Distrik Sentani;
PK.34.1-39	Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kampung Sereh Kecamatan Sentani;
PK.34.1-40	Berita Acara Nomor 46/PP.05.1-BA/02/Kab/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kampung Sereh Distrik Sentani);
PK.34.1-41	Form A Pengawas TPS 01 Kampung Yahim Distrik Sentani;
PK.34.1-42	31 (tiga puluh satu) lembar C6;

PK.34.1-43	04/TM/PU/33.05/ BWS-Kab.JPR/IV/2019 . tanggal 17 April 2019;
PK.34.1-44	39 (tiga puluh Sembilan) lembar C6;
PK.34.1-45	27 (dua puluh tujuh) lembar C6;
PK.34.1-46	Form Temuan Nomor 03/TM/PU/33.05/BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019;
PK.34.1-47	Form A Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Kemtuk Gresi;
KABUPATEN NABIRE	
PK.34.2 -1	Formulir Model C1-KPU DPRD TPS 01 Kampung Wami Distrik Yaur
PK.34.2 -2	Formulir Model C1-KPU DPRD TPS 02 Kampung Wami Distrik Yaur
PK.34.2 -3	Formulir Model C1-KPU DPRD TPS 03 Kampung Wami Distrik Yaur
PK.34.2 -4	Form A Pengawasan Panwas Distrik Yaur Pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.2 -5	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Yaur
PK.34.2 -6	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Dipa
PK.34.2 -7	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Makimi
PK.34.2 -8	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Nabire
PK.34.2 -9	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Menou
PK.34.2 -10	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kimi
PK.34.2 -11	Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Nabire
PK.34.2 -12	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten
PK.34.2 -13	Surat Rekomendasi Panwas Distrik Nabire Nomor : 07/HK.05/PWSL-NBR/2019.
PK.34.2 -14	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Nabire

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	
PK.34.3 -1	C1 DPRD Kab Kampung Tarau TPS 1,5,6,7,8,11,12,13,16,20, 25,28 dan TPS 30
PK.34.3 -2	C1 DPRD kab TPS 2 kamp. Barawaikap, TPS 14 Kel. Serui Kota, TPS 11, 20, 25, 28 dan 30 Kel. Tarau
PK.34.3 -3	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Angkaisera
PK.34.3 -4	Surat Bawaslu Kabupaten Yapen Nomor : 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019
PK.34.3 -5	Surat Bawaslu Kabupaten Yapen Nomor : 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019
PK.34.3 -6	Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yapen Nomor : 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019
PK.34.3 -7	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Anotaurei
PK.34.3 -8	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Kepulauan Ambai
PK.34.3 -9	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Kosiwo
PK.34.3 -10	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Teluk Ampimoi
PK.34.3 -11	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Yapen Timur
PK.34.3 -12	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Yapen Barat
PK.34.3 -13	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Yapen Selatan
PK.34.3 -14	Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yapen Nomor : 359/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019
PK.34.3 -15	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten
PK.34.3 -16	Formulir DB1 DPR Provinsi Papua Kabupaten Kepulauan Yapen Setelah Panyandingan Data
PK.34.3 -17	Rekaman Audio Visual Tentang Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten

PK.34.3 -18	Surat Rekomendasi Bawaslu Kepulauan Yapen terhadap KPU Provinsi Papua untuk memberikan sanksi secara tertulis kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
PK.34.3 -19	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Yawakukat
PK.34.3 -20	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Wonawa
PK.34.3 -21	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Poom
PK.34.3 -23	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Yerui
PK.34.3 -24	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Windesi
PK.34.3 -25	Surat KPU Kabupaten Yapen Nomor: 126/pp.05.1/9105/KPU-KAB/V/2019
PK.34.3 -26	Tanta Terima Laporan dari Peserta Pemilu: Hanura, PDIP, PSI, Gerindra, dan Perindo
PK.34.3 -27	Undangan Klarifikasi ke KPU Yapen
KABUPATEN BIAK NUMFOR	
PK.34.4-1	Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Biak Kota (Form Model A)
PK.34.4-2	Form Model DA1-DPR dan DA1-DPRP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Biak Kota
PK.34.4-3	Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Samofa (Form Model A)
PK.34.4-4	Form Model DA1-DPR dan DA1-DPRP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Samofa
PK.34.4-5	Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Biak Kota (Form Model A)
PK.34.4-6	Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor (Form Model A) (Lampiran Form Model Keberatan Bawaslu Biak Numfor
PK.34.4-7	Surat Rekomendasi PSU Nomor:

PK.34.4-8	Form Model DB1-DPR dan DB1-DPRP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kabupaten Biak Numfor
KABUPATEN PUNCAK JAYA	
PK.34.5 -1	Formulir C1-KPU DPRP se-Distrik Yamoneri
PK.34.5 -2	Formulir C1-KPU DPRP se-Distrik Mulia
PK.34.5 -3	Formulir C1-KPU DPRP se-Distrik Nioga
PK.34.5 -4	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Irimuli
PK.34.5 -5	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Gurage
PK.34.5 -6	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Tingginambut
PK.34.5 -7	Formulir Model DB1 DPRD Kabupaten Dapil 3 Distrik Tingginambut
PK.34.5 -8	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Dokome
PK.34.5 -9	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mulia
PK.34.5 -10	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Waegi
KABUPATEN PANIAI	
PK.34.6 -1	Form A Pengawasan Panwaslu Desa/Kampung se-Distrik Paniai
PK.34.6 -2	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -3	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Yagai
PK.34.6 -4	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Kebo
PK.34.6 -5	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Topiyai
PK.34.6 -6	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Yatamo
PK.34.6 -7	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Ekadidie
PK.34.6 -8	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Wegebino
PK.34.6 -9	Formulir Model DAA1 Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -10	Formulir Model DAA1 Kampung Aikai Distrik Paniai Timur

PK.34.6 -1	Formulir Model DAA1 Kampung Madi Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -2	Formulir Model DAA1 Kampung Ipakiye Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -3	Formulir Model DAA1 Kampung Papato Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -4	Formulir Model DAA1 Kampung Timida Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -5	Formulir Model DAA1 Kampung Amaogi Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -6	Formulir Model DAA1 Kampung Kopo Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -7	Formulir Model DAA1 Kampung Wouyebutu Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -8	Formulir Model DAA1 Kampung Awabutu Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -9	Formulir Model DAA1 Kampung Uwibutu Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -10	Formulir Model DAA1 Kampung Pudotadi Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -11	Formulir Model DAA1 Kampung Iyaitaka Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -12	Formulir Model DAA1 Kampung Ugibutu Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -13	Formulir Model DAA1 Kampung Kogekotu Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -14	Formulir Model DAA1 Kampung Ekeitadi Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -15	Formulir Model DAA1 Kampung Dupia Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -16	Formulir Model DAA1 Kampung Todia Distrik Siriwo
PK.34.6 -17	Formulir Model DAA1 Kampung Dadou Distrik Siriwo

PK.34.6 -18	Formulir Model DAA1 Kampung Bua Distrik Siriwo
PK.34.6 -19	Formulir Model DAA1 Kampung Nomokepota Distrik Siriwo
PK.34.6 -20	Formulir Model DAA1 Kampung Kepi Distrik Siriwo
PK.34.6 -21	Formulir Model DAA1 Kampung Dogomouta Distrik Siriwo
PK.34.6 -22	Formulir Model DAA1 Kampung Bugubutu Distrik Siriwo
PK.34.6 -23	Formulir Model DAA1 Kampung Eugai Distrik Siriwo
PK.34.6 -24	Formulir Model DAA1 Kampung Degetadi Distrik Siriwo
PK.34.6 -25	Formulir Model DAA1 Kampung Uwoyupi Distrik Siriwo
PK.34.6 -26	Formulir Model DAA1 Kampung Wegekebo Distrik Siriwo
PK.34.6 -27	Formulir Model DAA1 Kampung Yinotadi Distrik Siriwo
PK.34.6 -28	Formulir Model DAA1 Kampung Ibumomaida Distrik Kebo
PK.34.6 -29	Formulir Model DAA1 Kampung Ayaigo Distrik Kebo
PK.34.6 -30	Formulir Model DAA1 Kampung Kebo II Distrik Kebo
PK.34.6 -31	Formulir Model DAA1 Kampung Togowa Distrik Kebo
PK.34.6 -32	Formulir Model DAA1 Kampung Yokagadagi Distrik Kebo
PK.34.6 -33	Formulir Model DAA1 Kampung Geibu Distrik Kebo
PK.34.6 -34	Formulir Model DAA1 Kampung Mugimeketago Distrik Kebo
PK.34.6 -35	Formulir Model DAA1 Kampung Kagupagu Distrik Kebo
PK.34.6 -36	Formulir Model DAA1 Kampung Bunaida Distrik Kebo
PK.34.6 -37	Formulir Model DAA1 Kampung Uwaiye Distrik Kebo
PK.34.6 -38	Formulir Model DAA1 Kampung Tuwamakida Distrik Kebo
kPK.34.6 -39	Formulir Model DAA1 Kampung Kebo Satu Distrik Kebo
PK.34.6 -40	Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Paniai

PK.34.6 -41	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai atas Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
KABUPATEN SARMI	
PK.34.7 -1	Form A Hasil pengawasan Panwas Distrik Bonggo
PK.34.7 -2	Form A Pengawasan PTPS TPS 01 Kampung Surimania Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi
PK.34.7 -3	Salinan C1 Bina
PK.34.7 -4	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Apawer Hulu
KABUPATEN KEEROM	
PK.34.8 – 1	C1 Kampung Ampas
PK.34.8 – 2	Form A pengawasan Pengawas TPS.
PK.34.8 – 3	DAA1 Kampung Ampas
PK.34.8 - 4	Format .A Hasil Pengawasan PPL Kampung Ampas
PK.34.8 - 5	DA1 DPRD Kab/Kota
PK.34.8 - 6	Format A Pengawasan Panwas Distrik
PK.34.8-1	C1 Kampung Dubu
PK.34.8-2	C1 Kampung Umuaf TPS 01
PK.34.8-3	C1 Kampung Umuaf TPS 02
PK.34.8-4	C1 Kampung Embi
PK.34.8-5	C1 Kampung Semografi TPS 01
PK.34.8-6	C1 Kampung Semografi TPS 02
PK.34.8-7	C1 Kampung Tatakra
PK.34.8-8	Format A Pengawasan Panwas Distrik Web
PK.34.8-9	DA1 DPRD Kab/Kota
PK.34.8-10	Format APengawasan Bawaslu Keerom
PK.34.8 - 16	Formulir DB1 PPWP, DPR, DPD Provinsi
KABUPATEN WAROPEN	
PK.34.9 -1	Formulir Model DA1 Distrik Masirei
PK.34.9 -2	Formulir Model DA1 Distrik Demba

PK.34.9 -3	Formulir Model DA1 Distrik Wonti
PK.34.9 -4	Formulir Model DA1 Distrik Soyoi Mambai
PK.34.9 -5	Formulir model DB1 Kabupaten Waropen
KABUPATEN MAPPI	
PK.34.10 -1	Form A Pengawasan Panwas Distrik Minyamur untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.10 -2	Form A Pengawasan Panwas Distrik Passue untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.10 -3	Form A Pengawasan Panwas Distrik Haju untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.10 -4	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
PK.34.10 -5	Formulir Model DB1 DPRD Kabupaten Mappi
PK.34.10 -6	Formulir Model DB1 DPR Provinsi Kabupaten Mappi
KABUPATEN SUPIORI	
PK 34.11-01	Format A Pengawasan Supervise Pemungutan dan Perhitungan Suara Panwas Distrik Supiori Barat pada tanggal 17 April 2019
PK 34.11-02	Format A Pengawasan Supervise Pemungutan dan Perhitungan Suara Panwas Distrik Supiori Utara pada tanggal 17 April 2019
PK 34.11-03	Format A Pengawasan Supervise Pemungutan dan Perhitungan Suara Panwas Distrik Supiori Selatan pada tanggal 17 April 2019
PK 34.11-04	Format A Pengawasan Supervise Pemungutan dan Perhitungan Suara Panwas Distrik Supiori Kepulauan Aruri pada tanggal 17 April 2019

PK 34.11-05	Format A Pengawasan Supervise Pemungutan dan Perhitungan Suara Panwas Distrik Supiori Timur pada tanggal 17 April 2019
PK 34.11-06	Format A Pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik Supiori Barat.
PK 34.11-07	Format A Pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik Supiori Utara.
PK 34.11-08	Format A Pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik Supiori Selatan.
PK 34.11-09	Format A Pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik Supiori Kepulauan Aruri.
PK 34.11-10	Format A Pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik Supiori Timur.
PK 34.11-11	Format A Pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten oleh Bawaslu Kab Supiori.
PK 34.11-12	Format A Pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten oleh Bawaslu Kab Supiori.
PK 34.11-13	Format A Pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten oleh Bawaslu Kab Supiori.
PK 34.11-14	DA1
PK 34.11-15	DB1
PK 34.11-16	C.1
PK 34.11-17	Fom. A. Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan suara Tingkat PPL, dan PTPS
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	
PK.34.12 -1	Surat Rekomendasi Panwas Distrik Mamberamo Hulu, Kabupaten Mamberamo Tengah untuk PSU nomor: 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019

PK.34.12 -2	Surat Rekomendasi Panwas Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Tengah untuk PSU nomor: 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	
PK.34.13 -1	Form A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah
PK.34.13 -2	DB1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah
PK.34.13 -3	DAA1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah se-Distrik Kelila
Pk.34.13-4	DA1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Distrik Megambilis
Pk.34.13-5	DAA1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah se-Distrik Megambilis
Pk.34.13-6	DB1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah
KABUPATEN YALIMO	
PK.34.14 -1	Form A Pengawasan Supervisi Panwas Distrik Abenaho pada Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 001, Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho
PK.34.14 -2	Video keributan yang terjadi di TPS 001, Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho
PK.34.14 -3	Form A Pengawasan Panwas Distrik Abenaho pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo
PK.34.14 -4	Formulir model C1 TPS 001, Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho yang dibacakan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo

PK.34.14 -5	DA1-DPRD Dapil III Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo
PK.34.14 -6	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten Yalimo
PK.34.14 -7	Surat Penelusuran Dugaan Pelanggaran Panwas Distrik Abenaho No:001/PNWS/DIST.ABNH/IV/2019 tanggal 27 April 2019
PK.34.14 -8	DB1-DPRD Dapil III Kabupaten Yalimo
KABUPATEN LANNY JAYA	
PK.34.15 -1	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Melagi Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -2	Formulir Model DB1 DPRD Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -3	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya untuk Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
PK.34.15 -4	Form A Pengawasan Panwas Distrik Gupura untuk Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.15 -5	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Gupura Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -6	Formulir Model C1-KPU DPR RI se-Distrik Muara, Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -7	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Poga Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -8	Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -9	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Muara Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -10	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Gubume Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -11	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Gupura Kabupaten Lanny Jaya

PK.34.15 -12	Formulir Model DA1 DPRP Distrik Poga Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -13	Formulir Model DA1 DPRP Distrik Muara Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -14	Formulir Model DA1 DPRP Distrik Karu Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -15	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Ninime
PK.34.15 -16	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Malagai Neri
PK.34.15 -17	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Tiom
PK.34.15 -18	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Goa Balim
PK.34.15 -19	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kolawa
PK.34.15 -20	Form A Pengawasan Panwas Distrik Nogi terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.15 -21	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Nogi
PK.34.15 -22	Form A Pengawasan Panwas Distrik Tiom terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.15 -23	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Tiom
PK.34.15 -24	Form A Pengawasan Panwas Distrik Niname terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.15 -25	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Niname
PK.34.15 -26	Form A Pengawasan Panwas Distrik Yugungwi terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.15 -27	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Yugungwi
PK.34.15 -28	Tanda Terima Atas Laporan Iriana Wenda dengan nomor 23/TBPL/LP/PL/Bawaslu.Prov.PA/V/2019
PK.34.15 -29	Kajian Awal Atas Laporan Iriana Wenda
PK.34.15 -30	Status Laporan Nomor :75/HM/Bawaslu.Kab.LJ/V/2019
PK.34.15 -31	Form A Pengawasan Panwas Distrik Gelok Beam terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.15 -32	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Gelok Beam

PK.34.15 -33	Form A Pengawasan Panwas Distrik Bruwa terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.15 -34	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Bruwa
KABUPATEN PUNCAK	
PK.34.17 -1	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten
PK.34.17 -2	Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor: 36/RPU/23/Kab/Puncak/V/2019
PK.34.17 -3	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak terkait tindak lanjut KPU Kabupaten Puncak untuk Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor: 36/RPU/23/Kab/Puncak/V/2019
PK.34.17 -4	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten
PK.34.17 -5	Form A Pengawasan Panwas Distrik Amungkalpia dan Distrik Binna tahapan Pemungutan dan Perhitungan Pemilu Tahun 2019
PK.34.17 -6	Formulir DA1 Distrik Ilaga Utara, Distrik Amungkalpia dan Distrik Gome Utara
PK.34.17 -7	Form A Pengawasan Panwas Distrik untuk tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Distrik
PK.34.17 -8	Fomulir Model DB1 DPRD Kabupaten Punca
KABUPATEN DOGIAYI	
PK.34.18 -1	Form A Bawaslu Kabupaten Dogiayi Terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019
PK.34.18 -2	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Dogiayi
PK.34.18 -3	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kamu Utara
PK.34.18 -4	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kamu Selatan

PK.34.18 -5	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kamu Timur
PK.34.18 -6	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mapia Tengah
PK.34.18 -7	Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Dogiayi
PK.34.18 -8	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten RI Distrik Kamu Utara
PK.34.18 -9	Formulir Model DB1 DPRD Kabupaten Dogiayi
PK.34.18 -20	Surat Rekomendasi Bawaslu Dogiayi nomor: 006/Rek/Bws.dgy/33.27/V/2019
KABUPATEN INTAN JAYA	
PK.34.19 -1	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Sugapa
PK.34.19 -2	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Agisiga
PK.34.19 -3	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Hitadipa
PK.34.19 -4	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Homeo
PK.34.19 -5	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Ugimba
PK.34.19 -6	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Biandoga
PK.34.19 -7	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Tomosiga

PK.34.19 -8	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Wandai
PK.34.19 -9	Rekomendasi Bawaslu Kab.Intan Jaya tentang penandingan data untuk KPU Kab. Intan Jaya
PK.34.19 -10	Rekomendasi Bawaslu Provinsi
PK.34.19 -11	Fomr. A Pengawasan Pleno di Provinsi oleh KPU Kabupaten Intan Jaya
KABUPATEN DEIYAI	
PK.34.20 -1	Formulir Model DA1 Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai
PK.34.20 -2	Formulir Model DA1 Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai
PK.34.20 -3	Formulir Model DA1 Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai
PK.34.20 -4	Formulir Model DA1 Distrik Kampiraya, Kabupaten Deiyai
PK.34.20 -5	Formulir Model DA1 Distrik Kampiraya, Kabupaten Deiyai Bouwobado
PK.34.20 -6	Formulir Model DB1 Kabupaten Deiyai
PK.34.20 -7	Form A Pengawasan Panwas Distrik Boubado terhadap Distribusi Logistik Pemilu di Distrik Bowobado Pada Tanggal 17 April 2019
PK.34.20 -8	Form A Pengawasan Panwas Distrik Boubado terhadap Distribusi Logistik Pemilu di Distrik Bowobado Pada Tanggal 9 April 2019
PK.34.20 -9	Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten se-Distrik Boubado
PK.34.20 -10	Form A Pengawasan Panwas Distrik Boubado terhadap Distribusi Logistik Pemilu di Distrik Bowobado Pada Tanggal 19 April 2019
PK.34.20 -11	Form A Pengawasan Panwas Distrik Boubado terhadap Pergeseran Logistik Pemilu ke Kantor KPUD di Distrik Bowobado

PK.34.20 -12	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai atas Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
PK.34.20 -13	Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai untuk pemungutan suara di Distrik Boubado
PK.34.20 -14	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai atas Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten ada tanggal 4 Mei 2019
PK.34.20 -15	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai atas Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
PK.34.20 -16	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai atas Pemungutan Suara Susulan di Distrik Baoubado
PK.34.20 -17	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai atas Perhitungan Suara Susulan di Distrik Baoubado
KOTA JAYAPURA	
Bukti PK.34.21-1	Form A. Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 46/LHP/PM.31.01/IV/2019, tanggal 18 April 2019
Bukti PK.34.21-2	BA Nomor 40/BA/Hk.04.1/9171/KPU/IV/2019 Tentang Keterlambatan Distribusi Logistik Ke Tempat Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
Bukti PK.34.21-3	Kronologis Keterlambatan Logistik tanggal 17 April 2019
Bukti PK.34.21-4	Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 278/K.Bawaslu-Kota.JPR/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan, tertanggal 17 April 2019

Bukti PK.34.21-5	BA Nomor 41/BA/Hk.04.1/9171/KPU/IV/2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Susulan di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
Bukti PK.34.21-6	Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 50.1/LHP/PM.31.01/IV/2019, tanggal 20 April 2019
Bukti PK.34.21-7	Surat Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram pada tanggal 16 Mei 2019.
Bukti PK.34.21-8	Surat Rekomendasi Nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Abepura pada tanggal 16 Mei 2019.
Bukti PK.34.21-9	Surat Rekomendasi Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 16 Mei 2019.
Bukti PK.34.21-10	Surat Rekomendasi Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Utara pada tanggal 16 Mei 2019.

Bukti PK.34.21-11	Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 323/K.Bawaslu-Kota.JPR/IV/2019 Perihal Saran Perbaikan, tertanggal 19 April 2019
Bukti PK.34.21-12	Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 50.4/LHP/PM.31.01/V/2019, tanggal 20 Mei 2019
Bukti PK.34.21-13	Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Jayapura Utara
Bukti PK.34.21-14	Berita Acara Nomor 60/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Jayapura Pemilihan Umum tahun 2019
Bukti PK.34.21-15	Model DB1-KPU (Dapil Kota Jayapura 2)
Bukti PK.34.21-16	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-17	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan FOrmulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama A. Rilyke M. Muabuay
Bukti PK.34.21-18	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama A. Rilyke M. Muabuay
Bukti PK.34.21-19	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Zubaidah
Bukti PK.34.21-20	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Zubaidah
Bukti PK.34.21-21	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Zubaidah

Bukti PK.34.21-22	Form A. Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 50.3/LHP/PM.31.01/V/2019, tanggal 20 Mei 2019
Bukti PK.34.21-23	Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Jayapura Selatan
Bukti PK.34.21-24	Model DB1-KPU (Dapil Kota Jayapura 1)
Bukti PK.34.21-25	Berita Acara Nomor: 57/BA/Hk.04.1/9171/KPU/V2019 tentang Sinkronisasi data sertifikasi dan hasil perhitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan
Bukti PK.34.21-26	Surat Rekomendasi nomor: 305/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tentang Rekomendasi untuk membuka C1 Plano.
Bukti PK.34.21-27	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 15 Mei 2019 atasnama H. Abdul Rajab (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-28	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 Mei 2019 atasnama Bernard M. Rumkorem (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-29	Model Formulir B1 Penerimaan dan Model Formulir B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Junaedi Rahim
Bukti PK.34.21-30	Model Formulir B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Junaedi Rahim

Bukti PK.34.21-31	Model Formulir B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Junaedi Rahim
Bukti PK.34.21-32	Model Formulir B1 Penerimaan Laporan dan Model Formulir B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Andre W. Fonataba
Bukti PK.34.21-33	Model Formulir B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Andre W. Fonataba
Bukti PK.34.21-34	Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Heram
Bukti PK.34.21-35	Model DB1-KPU Kota (Dapil Kota Jayapura III)
Bukti PK.34.21-36	Model DA1 PPWP, Model DA1 DPR, Model DA1 DPD, Model DA1 DPRP dan Model DA1 Kabupaten/Kota pada tingkat Distrik Heram.
Bukti PK.34.21-37	Sertifikasi Perhitungan Suara Calon DPR
Bukti PK.34.21-38	Sertifikasi Perhitungan Suara Calon DPRD Kab/Kota
Bukti PK.34.21-39	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-40	Model Formulir B1 Penerimaan Laporan dan Model Formulir B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Ferry S.H.
Bukti PK.34.21-41	Model Formulir B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Ferry S.H.
Bukti PK.34.21-42	Model Formulir B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Ferry S.H.

Bukti PK.34.21-43	Model Formulir B1 Penerimaan Laporan dan Model Formulir B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Welson Airon Wonda
Bukti PK.34.21-44	Model Formulir B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Welson Airon Wonda
Bukti PK.34.21-45	Model Formulir B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Welson Airon Wonda
Bukti PK.34.21-46	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-47	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-48	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Hadirat S. Zega
Bukti PK.34.21-49	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Hadirat S. Zega
Bukti PK.34.21-50	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Hadirat S. Zega
Bukti PK.34.21-51	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Dapil Kota Jayapura II atasnama Simon P. Latue (Model DB2-KPU)

Bukti PK.34.21-52	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Dapil Kota Jayapura I atasnama Simon P. Latue (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-53	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atasnama Riko F. Walubun (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-54	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Safrudin
Bukti PK.34.21-55	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Safrudin
Bukti PK.34.21-56	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Safrudin
Bukti PK.34.21-57	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Bani Tabuni
Bukti PK.34.21-58	Surat Pelimpahan Laporan Pelanggaran dari Bawaslu Provinsi dengan nomor: 153/K.Bawaslu- Prov.Pa/PM.06.01
Bukti PK.34.21-59	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Bani Tabuni
Bukti PK.34.21-60	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Bani Tabuni
Bukti PK.34.21-61	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

	Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atasnama Ardon E. Nauw (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-62	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atasnama Otis Deda (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-63	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Simon Petrus Bame
Bukti PK.34.21-64	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Simon Petrus Bame
Bukti PK.34.21-65	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Simon Petrus Bame
Bukti PK.34.21-66	Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 50.2/LHP/PM.31.01/IV/2019, tanggal 20 April 2019
Bukti PK.34.21-67	Surat Rekomendasi Nomor 027/LV/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram pada tanggal 16 Mei 2019.
Bukti PK.34.21-68	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Sely Wanimbo
Bukti PK.34.21-69	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Sely Wanimbo

Bukti PK.34.21-70	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Sely Wanimbo
Bukti PK.34.21-71	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atasnama Ali Parawawan (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-72	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Fransisco Ardamis
Bukti PK.34.21-73	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Fransisco Ardamis
Bukti PK.34.21-74	Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Abepura
Bukti PK.34.21-75	Model DB1-KPU Dapil Kota Jayapura IV
Bukti PK.34.21-76	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Buni Yikwa
Bukti PK.34.21-77	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Buni Yikwa
Bukti PK.34.21-78	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Buni Yikwa
Bukti PK.34.21-79	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Jimmy Emanuel Siep
Bukti PK.34.21-80	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Jimmy Emanuel Siep

Bukti PK.34.21-81	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Jimmy Emanuel Siep
Bukti PK.34.21-82	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atasnama Saksi Partai Solidaritas Indonesia (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-83	Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Kampante Pemilihan Umum serentah Tahun 2019 yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-84	Dokumentasi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
Bukti PK.34.21-85	Dokumentasi Deklarasi Pemilu Damai
Bukti PK.34.21-86	Surat nomor: 174/K.Bawaslu.KotaJPR/PW.04/X/2018 Perihal Ronda Bawaslu Jaga Hak Pilih yang ditujukan kepada Pengelolah Pusat Perbelanjaan di Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-87	Surat nomor: 175/K.Bawaslu.KotaJPR/PW.04/IX/2018 Perihal Ronda Bawaslu Jaga Hak Pilih yang ditujukan kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi di Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-88	Surat nomor:/K.Bawaslu.KotaJPR/PW.04/XI/2018 Perihal Tindak Lanjut Ronda Bawaslu Kota Jayapura yang diajukan kepada Peneglolah Pasar Tradisional Di Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-89	Surat nomor:/K.Bawaslu.KotaJPR/PW.04/XI/2018 Perihal Tindak Lanjut Ronda Bawaslu Kota Jayapura yang diajukan kepada Pengelolah Supermarket di Kota Jayapura

Bukti PK.34.21-90	Surat nomor:/K.Bawaslu.KotaJPR/PW.04/XI/2018 Perihal Tindak Lanjut Pencermatan DPTHP-2 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-91	Surat nomor: 181/K.Bawaslu.KotaJPR/PW.04/XI/2018 Perihal Hasil Ronda Bawaslu Jaga Hak Pilih
Bukti PK.34.21-92	Surat nomor: 182/K.Bawaslu.KotaJPR/PW.04/XI/2018 Perihal Koordinasi DPTHP-1 dan Ronda Bawaslu Jaga Hak Pilih yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua
Bukti PK.34.21-93	Dokumentasi Foto Ronda Bawaslu Jaga Hak Pillih di Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-94	Dokumentasi Deklarasi Pemilu Damai, Bersih dan Bermartabat yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Papua
Bukti PK.34.21-95	Dokumentasi Jambore Pengawasan Partisipatif Pemuda Lintas Iman yang dilaksanakan oleh Provinsi Papua
Bukti PK.34.21-96	Kerangka Acuan Lokakarya Kampanye Pencegahan Konflik Berbasis IT
Bukti PK.34.21-97	Dokumentasi Foto "Ngopi JAHE" bersama BEM dan OKP se-Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-98	Dokumentasi Foto "Ngopi JAHE" bersama Pegiat Media Alternatif di Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-99	Dokumentasi Foto "Ngopi JAHE" bersama Aktivis Perempuan Papua di Kota Jayapura

Bukti PK.34.21-100	Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dengan STIH Ummel Mandiri Jayapura tentang Kerja sama Dalam Rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
Bukti PK.34.21-101	Dokumentasi Foto Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dan STIH Umel Mandiri
Bukti PK.34.21-102	Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dengan Universitas Cenderawasih tentang Kerja sama Dalam Rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
Bukti PK.34.21-103	Dokumentasi Foto Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dan Universitas Cenderawasih
Bukti PK.34.21-104	Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dengan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura tentang Kerja sama Dalam Rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
Bukti PK.34.21-105	Dokumentasi Foto Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Bukti PK.34.21-106	Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dengan Sekolah Tinggi Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Silas Papare Jayapura tentang Kerja sama Dalam Rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
Bukti PK.34.21-107	Dokumentasi Foto Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dan Sekolah Tinggi Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Silas Papare Jayapura
Bukti PK.34.21-108	Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dengan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Muhammadiyah Papua tentang Kerja sama Dalam Rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
Bukti PK.34.21-109	Dokumentasi Foto Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Muhammadiyah Papua
Bukti PK.34.21-110	Surat Permohonan Pemateri dan Kerangka Acuan Kegiatan "Workshop Peningkatan Peran Perempuan Orang Asli Papua dan Pengambilan Keputusan" yang Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-111	Surat nomor: 239/K.Bawaslu-Kota.JPR/III/2019 tentang Undangan Pencanangan Abepura Sebagai Distrik Tolak Politik dan Tolak Politik Uang yang

	ditujukan kepada Ketua dan Anggota Koalisi Kampus Untuk Pemilu Berkualitas di Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-112	Dokumentasi Deklarasi Abepura Sebagai Distrik Tolak GOLPUT dan Tolak Politik Uang Bersama Ketua Bawaslu RI
Bukti PK.34.21-113	Dokumentasi Rapat Koordinasi Pembahasan Iklan Kampanye dan Jadwal Kampanye Rapat Umum oleh KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-114	Dokumentasi Rapat Sosialisasi Kampanye Iklan dan Media
Bukti PK.34.21-115	Surat nomor: 263/K.Bawaslu-Kota.JYP/IV/2019 perihal: Undangan Sosialisasi yang ditujukan kepada Ketua Komunitas Difabel Provinsi Papua
Bukti PK.34.21-116	Dokumentasi Sosialisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas dan Pengawasan Partisipatif Bersama Komunitas Difabel Papua
Bukti PK.34.21-117	Dokumentasi Foto dan Flyer Sosialisasi Tolak Politik Uang dan Tolak Golput Melalui Selebaran Pada Masyarakat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-118	Surat Undangan dari KPU Kota Jayapura kepada Bawaslu Kota Jayapura dengan nomor: 095.1/UND-KPU/030.434279/IV/2019 perihal: Undangan
	Memberikan Materi pada Bimbingan Teknis LPPDK
Bukti PK.34.21-119	Dokumentasi Foto Sosialisasi Pengawasan Partisipatif untuk Generasi Milenial Bersama Koalisi Kampus
Bukti PK.34.21-120	Surat tertanggal 17 Juli 2018 dengan nomor: 135/K.Panwas-Kota.JPR/VII/2018 perihal: Permintaan

	Data Salinan DPS Pada Pelaksanaan PILEG dan PILPRES yang ditujukan kepada KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-121	Surat tertanggal 25 Juli 2018 dengan nomor: 139/K.Panwas-Kota.JPR/VII/2018 perihal: Himbauan Pencetakan E-KTP Sebagai Syarat Pemilihan Umum 2019 yang ditujukan kepada Walikota Jayapura Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-122	Surat tertanggal 20 Agustus 2018 dengan nomor: 145/k.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/VIII/208 perihal: Pengawasan Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Jayapura yang ditujukan kepada KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-123	Berita Acara nomor: 121/BA/KPU/030.434279/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2019
Bukti PK.34.21-124	A.3.1-KPU "Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-125	Surat tertanggal 17 September 2018 dengan nomor: 161/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/IX/2018 perihal Permintaan Data Potensial Pemilih Kota Jayapura Pada Pemilu Tahun 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Jayapura

Bukti PK.34.21-126	surat tertanggal 27 Agustus 2018 dengan nomor: 153/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/VIII/2018 perihal: Permintaan Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Jayapura yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-127	surat tertanggal 29 Agustus 2018 dengan nomor: 156/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/VIII/2018 perihal: Surat Ke-2 (kedua) Data Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pelaksanaan PILEG dan PILPRES yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-128	Surat tertanggal 1 Oktober 2018 dengan nomor: 168/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/X/2018 perihal: Pencermatan DPT yang ditujukan kepada Pengurus Partai Politik tingkat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-129	Dokumentasi Foto Sinkronisasi DPTHP Antara Bawaslu Kota Jayapura dan KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-130	Rilis Bawaslu Kota Jayapura tentang "DPT Ganda dan Ronda Bawaslu Kota Jayapura"
Bukti PK.34.21-131	Form Model A: Laporan Pengawas Pemilu tertanggal 10 Desember 2018 dalam rangka Pengawasan Melekat dan Pengawasan Dokumen Terhadap DPTHP-2 Kota Jayapura pada Pemilu 2019
Bukti PK.34.21-132	Dokumentasi Foto Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan DPTHP-2 Kota Jayapura Untuk Pemilu 2019

Bukti PK.34.21-133	Form Model A: Laporan Pengawas Pemilu tertanggal 17 Februari 2019 Februari 17 dalam rangka Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan
Bukti PK.34.21-134	Surat tertanggal 22 November 2018 dengan nomor: 183/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/XI/2018 perihal Tindak Lanjut Pencermatan DPTHP-2 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-135	Form Model A: Laporan Pengawasan Pemilu tertanggal 22 Maret 2019 yang berkaitan dengan pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Tahap 2 (DPTb-2).
Bukti PK.34.21-136	Dokumentasi Foto Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Kota Jayapura untuk Pemilu 2019
Bukti PK.34.21-137	Form Model A: Laporan Pengawasan Pemilu tertanggal 12 Maret 2019 yang berkaitan dengan pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Tahap 3 (DPTb-3).
Bukti PK.34.21-138	Surat tertanggal 28 Agustus 2018 dengan nomor: 154/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/VIII/2018 perihal Pemberitahuan tentang Aturan dan Larangan-larangan Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2019 yang ditujukan kepada Pengurus Partai Politik Tingkatan Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-139	Surat tertanggal 12 September 2018 dengan nomor: 158/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/IX/2018 perihal Larangan untuk Tidak Melakukan Kampanye di Luar Jadwal dan Permintaan untuk Menurunkan Atribut

	Partai di Luar Sekretariat Partai yang ditujukan kepada Pengurus Partai Politik Tingkatan Kota Jayapura
Bukti PK.34.21- 140	Surat tertanggal 22 September 2018 dengan nomor: 164/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/IX/2018 perihal Pendaftaran Tim Kampanyee dan Akun Media Sosial Partai Politik Peserta Pemilu yang ditujukan kepada Pengurus Partai Politik Tingkatan Kota Jayapura
Bukti PK.34.21- 141	Surat tertanggal 17 Oktober 2018 dengan nomor: 173/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/X/2018 perihal Permintaan Salinan Tembusan Pendaftaran Tim Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye Pemilu yang ditujukan kepada Pengurus Partai Politik Tingkatan Kota Jayapura dan Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPD Kota Jayapura
Bukti PK.34.21- 142	Surat tertanggal 06 November 2018 dengan nomor: 177/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/XI/2018 perihal Himbauan Pemasangan APK dan BK Pada tempat yang sudah ditetapkan yang ditujukan kepada Seluruh Tim Kampanye Partai Politik
Bukti PK.34.21- 143	Surat tertanggal 08 November 2018 dengan nomor: 180/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/XI/2018 perihal Koordinasi Mengenai Penertiban APK dan BK yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Jayapura
Bukti PK.34.21- 144	Surat tertanggal 28 November 2018 dengan nomor: 190/K.Bawaslu.Kota-JPR/04/XI/2018 perihal Permintaan Data Jumlah APK untuk Setiap Partai Politik yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Selaku KPU Kota Jayapura

Bukti PK.34.21-145	Surat tertanggal 28 November 2018 dengan nomor: 192/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/XI/2018 perihal Pemberitahuan Pemasangan APK Pada Tempat Yang Sudah Ditetapkan yang ditujukan kepada Tim Kampanye Partai Politik Tingkat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-146	Surat tertanggal 18 Desember 2018 dengan nomor: 199/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/XII/2018 perihal Himbauan Penertiban APK di Luar Zona Kampanye yang ditujukan kepada Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-147	Surat tertanggal 14 Januari 2019 dengan nomor: 202/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/I/2019 perihal Rekomendasi Penertiban APK dan BK yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-148	Surat tertanggal 12 Februari 2019 dengan nomor: 210/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/II/2019 perihal Penertiban APK yang Melanggar Aturan yang ditujukan kepada Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-149	Surat tertanggal 13 Februari 2019 dengan nomor: 215/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/II/2019 perihal Larangan Kampanye Di Tempat Ibadah yang ditujukan kepada Badan Pengurus Klasis GKI Sentani
Bukti PK.34.21-150	Surat tertanggal 18 Februari 2019 dengan nomor: 219/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/II/2019 perihal Larangan Kampanye Di Rumah Sakit dan Tempat Pelayanan Kesehatan yang ditujukan kepada Badan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura

<p>Bukti PK.34.21-151</p>	<p>Surat tertanggal 18 Februari 2019 dengan nomor: 220/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/II/2019 perihal Larangan Kampanye Lembaga Pendidikan (Gedung Atau Sekolah) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura</p>
<p>Bukti PK.34.21-152</p>	<p>Surat tertanggal 26 Februari 2019 dengan nomor: 225/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/II/2019 perihal Penertiban Alat Peraga Kampanye Se-Kota Jayapura yang ditujukan kepada 1). Kepala Satpol PP Kota Jayapura dan 2). Ka. Polres Jayapura Kota</p>
<p>Bukti PK.34.21-153</p>	<p>Surat tertanggal 7 Maret 2019 dengan nomor: 231/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/III/2019 perihal Pemberitahuan Tentang Aturan dan Larangan Kampanye yang ditujukan kepada 1). Tim Kampanye Calon Presiden RI dan Wakil Presiden RI Tingkat Kota Jayapura; 2). Tim Kampanye Partai Politik/Calon Anggota DPRD Tingkat Kota Jayapura dan 3). Tim Kampanye Calon Anggota DPD Tingkat Kota Jayapura</p>
<p>Bukti PK.34.21-154</p>	<p>Surat tertanggal 30 Maret 2019 dengan nomor: 250/K.Bawaslu.Kota-JPR/III/2019 perihal Tanggapan Atas Surat DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Jayapura yang ditujukan Ketua Dewan Pimpinan Daerah PSI Kota Jayapura</p>
<p>Bukti PK.34.21-155</p>	<p>Surat tertanggal 30 Maret 2019 dengan nomor: 252/K.Bawaslu.Kota-JPR/III/2019 perihal Pemberitahuan Tentang Aturan dan Larangan Kampanye Bagi Walikota dan Wakil Walikota yang ditujukan kepada 1). Walikota Jayapura dan 2). Wakil Walikota Jayapura</p>

Bukti PK.34.21-156	Surat tertanggal 30 Maret 2019 dengan nomor: 253/K.Bawaslu.Kota-JPR/III/2019 perihal Larangan Melibatkan Anak Sekolah Dalam Kampanye Rapat Umum dan Kampanye Iklan Media Pada Pemilu 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-157	Surat tertanggal 30 Maret 2019 dengan nomor: 254/K.Bawaslu.Kota-JPR/III/2019 perihal Himbauan Terkait Larangan Bagi ASN, Direksi, Komisaris, Dewan Pengurus dan Karyawan BUMD/BUMDES, Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada Pelaksanaan Pemilu 2019 yang ditujukan kepada Walikota Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-158	Surat tertanggal 30 Maret 2019 dengan nomor: 255/K.Bawaslu.Kota-JPR/III/2019 perihal Pemberitahuan Tentang Aturan Kampanye Rapat Umum yang ditujukan kepada Ketua Partai Politik Tingkat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-159	Surat tertanggal 12 April 2019 dengan nomor: 271/K.Bawaslu.Kota-JPR/IV/2019 perihal Penertiban APK Pada Masa Tenang yang ditujukan kepada Partai Politik Tingkat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-160	Surat tertanggal 12 April 2019 dengan nomor: 272/K.Bawaslu.Kota-JPR/IV/2019 perihal Larangan Pada Masa Tenang yang ditujukan kepada Partai Politik Tingkat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-161	Surat tertanggal 12 April 2019 dengan nomor: 273/K.Bawaslu.Kota-JPR/IV/2019 perihal Penertiban

	APK dan BK Pada Masa Tenang yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-162	Surat tertanggal 12 April 2019 dengan nomor: 274/K.Bawaslu.Kota-JPR/IV/2019 perihal Penertiban APK dan BK Pada Masa Tenang yang ditujukan kepada Kepala Polresta Jayapura Kota
Bukti PK.34.21-163	Form Model A: Laporan Pengawasan Pemilu tertanggal 18 Desember 2018 yang berkaitan dengan pengawasan Distribusi Logistik Pemilu 2019
Bukti PK.34.21-164	Dokumentasi Foto Pengawasan Keberadaan Logistik Pemilu 2019 Pada Gudang Logistik Pemilu 2019 Pada Gudang Logistik KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-165	Form Model A: Laporan Pengawasan Pemilu tertanggal 28 Februari 2019 yang berkaitan dengan pengawasan Distribusi Logistik Pemilu 2019; Penerimaan Surat Suara Untuk Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-166	Dokumentasi Foto Pengawasan Surat Suara Pemilu 2019 untuk Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-167	Surat tertanggal 02 Maret 2019 dengan nomor: 228/K.Bawaslu.Kota-JPR/III/2019 perihal Keamanan Surat Suara yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Selaku Ketua KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-168	Rilis Bawaslu Kota Jayapura tentang "Keamanan Pergerakan dan Pelipatan Surat Suara Pemilu 2019"
Bukti PK.34.21-169	Form Model A: Laporan Pengawasan Pemilu tertanggal 10 April 2019 yang berkaitan dengan

	pengawasan Pemenuhan Surat Suara untuk Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-170	Dokumentasi Foto Pengambilan Surat Suara Di Perusahaan PT. Adi Perkasa Makassar
Bukti PK.34.21-171	Surat tertanggal 11 April 2019 dengan nomor: 269/K.Bawaslu.Kota-JPR/IV/2019 perihal Kelengkapan Logistik di TPS yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-172	Form Model A: Laporan Pengawasan Pemilu tertanggal 18 April 2019 yang berkaitan dengan pengawasan Distribusi Logistik Pemilu Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-173	Form Model A: Laporan Pengawasan Pemilu tertanggal 15 April 2019 yang berkaitan dengan pengawasan Pemusnahan Surat Suara Rusak
Bukti PK.34.21-174	Dokumentasi Foto Pemusnahan Surat Suara Rusak
KABUPATEN JAYAWIJAYA	
PK.34.23 -1	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
PK.34.23 -2	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Wadanku
PK.34.23 -3	Formulir Model DA1 DPRD Dapil 2 se-Kabupaten Jayawijaya
PK.34.23 -4	Formulir Model DB1 DPRD Dapil 2 Kabupaten Jayawijaya
PK.34.23 -5	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Labarek
PK.34.23 -6	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Pisugi

PK.34.23 -7	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Hubikiak
PK.34.23 -8	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Hubikosi
PK.34.23 -9	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Musatfak
PK.34.23 -10	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Silo Sukarno Doga
PK.34.23 -11	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Wita Waya
PK.34.23 -12	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Asologima
PK.34.23 -13	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Asotipo
PK.34.23 -14	Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Jayawijaya
PK.34.23 -15	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik di Dapil 2 Jayawijaya
PK.34.23 -16	Surat Rekomendasi Bawaslu Jayawijaya Nomor: 132/K.BAWASLUJYW/PM.03.01/V/2019
PK.34.23 -17	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Wame
PK.34.23 -18	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Dapil 3
PK.34.23 -19	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Dapil 4
KABUPATEN MIMIKA	
PK.34.24 -1	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mimika Baru
PK.34.24 -2	Form A Pengawasan Panwas Distrik Mimika Baru pada Tahapan Rekapitulasi di Tingkat Distrik
PK.34.24 -3	Form A Pengawasan Staf Bawaslu Kabupaten Mimika pada Tahapan Rekapitulasi di Tingkat Distrik
PK.34.24 -4	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika pada Tahapan Rekapitulasi di Tingkat Distrik
PK.34.24 -5	Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Mimika

PK.34.24 -6	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Agimuga Kabupaten Mimika
PK.34.24 -7	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Alama Kabupaten Mimika
PK.34.24 -8	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Amar Kabupaten Mimika
PK.34.24 -9	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Hoya Kabupaten Mimika
PK.34.24 -10	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Iwaka Kabupaten Mimika
PK.34.24 -11	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Jila Kabupaten Mimika
PK.34.24 -12	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Jita Kabupaten Mimika
PK.34.24 -13	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika
PK.34.24 -14	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Narama Kabupaten Mimika
PK.34.24 -15	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika
PK.34.24 -16	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika
PK.34.24 -17	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika
PK.34.24 -18	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mimika Tengah Tengah Kabupaten Mimika
PK.34.24 -19	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mimika Timur Tengah Kabupaten Mimika
PK.34.24 -20	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mimika Timur Jauh Tengah Kabupaten Mimika
PK.34.24 -21	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika

PK.34.24 -22	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Wania Kabupaten Mimika
PK.34.24 -23	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	
PK.34.25 -1	Formulir model DA1 DPR RI se-Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -2	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Okbibab Distrik Okbiba Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -3	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Oksamol Distrik Oksamol Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -4	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Okaom Distrik Okaom Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -5	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Okbab Distrik Okbab Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -6	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Aboy Distrik Aboy Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -7	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Oklap Distrik Oklap Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -8	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Serambakon Distrik Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -9	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Serambakon Distrik Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang
KABUPATEN YAHUKIMO	
PK.34.26 -1	Berita Acara Bawaslu Provinsi Papua Nomor:008/Bawaslu-Provinsi.BA.PD/V/2019
PK.34.26 -2	Form A Pengawasan Panwas Distrik se-Kabupaten Yahukimo terkait Rekapitulasi Tingkat Distrik
KABUPATEN TOLIKARA	

PK.34.27 -1	Pelimpahan Laporan dari Bawaslu Provinsi Papua ke Bawaslu Kabupaten Tolikara dengan nomor : 35/TBPL/LP/PL/Bawaslu.Prov.Pa/V/2019
PK.34.27 -2	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Air Garam, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -3	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -4	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -5	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Bogonuk, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -6	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Goyage, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -7	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Geya, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -8	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Bogonuk, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -9	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Bogonuk, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -10	Form A Pengawasan Panwas Distrik Karubaga untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Distrik
PK.34.27 -11	Formulir Model DA1 DPRP Distrik Karubaga
PK.34.27 -12	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Konda
PK.34.27 -13	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Woniki
PK.34.27 -14	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Pogeneri
PK.34.27 -15	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Nabunage
PK.34.27 -16	Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -17	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Egiam
PK.34.27 -18	Status Laporan atas nama Daud Kogoya

PK.34.27 -19	Form A Pengawasan Panwas Distrik Wina untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Distrik
PK.34.27 -20	Form A Pengawasan Panwas Distrik se-Kabupaten Tolikara untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Distrik
PK.34.27 -21	Pelimpahan Laporan dari Bawaslu Provinsi Papua ke Bawaslu Kabupaten Tolikara dengan nomor : 129/TBPL/LP/PL/Bawaslu.Prov.Pa/V/2019
PK.34.27 -22	Berita Acara KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 23/BA/KPU-KAB.TL/IV/2019
KABUPATEN BOVEN DIGOEL	
PK 34.28-01	Form A Pengawasan Pembetulan DPT
KABUPATEN ASMAT	
PK.34.29 -1	Formulir Model DA1-KPU DPR RI Distrik Derkomour
PK.34.29 -2	Formulir Model DA1-KPU DPR RI Distrik Akat
PK.34.29 -3	Formulir Model DB1-KPU DPR RI Kabupaten Asmat
PK.34.29 -4	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat atas tahapan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
PK.34.29 -5	Rekomendasi PSU
PK.34.29 -6	Formulir Model C1 DPRD Kabupaten TPS 01 dan 03 Kampung Bismam Distrik Agats
PK.34.29 -7	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Agats
PK.34.29 -8	Formulir Model DB1 DPRD Kabupaten Kabupaten Asmat